DINAS KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN BREBES

BREBES BERES!

RENSTRA 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

















(0283) 671-846
dinkesda.brebeskab.go.id
Jl. dr. Wahidin No. 02 Brebes

SALINAN

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang :

a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani, perlu rencana strategis Perangkat Daerah;
b. bahwa agar terwujud integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan baik dalam mewujudkan keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah,
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan serta sub kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V : penutup.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. sekretariat Daerah;
b. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
c. inspektorat Daerah;
d. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
e. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
f. badan pendapatan Daerah;
g. badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
h. badan penanggulangan bencana Daerah;
i. badan kesatuan bangsa dan politik;
j. satuan polisi pamong praja;
k. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
l. dinas kesehatan Daerah;
m. dinas pekerjaan umum;
n. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
o. dinas pengeloaan sumber daya air dan tata ruang;
p. dinas sosial;
q. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
r. dinas lingkungan hidup;
s. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
t. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
u. dinas perhubungan;
v. dinas komunikasi, informatika dan statistik;
w. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
x. dinas kearsipan dan perpustakaan;
y. dinas kebudayaan dan pariwisata;
z. dinas pertanian dan ketahanan pangan;
aa. dinas perikanan;
bb. dinas peternakan dan kesehatan hewan;
cc. dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
dd. dinas perindustrian dan tenaga kerja;
ee. kecamatan brebes;

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ff. kecamatan wanasari;
gg. kecamatan bulakamba;
hh. kecamatan tanjung;
ii. kecamatan losari;
jj. kecamatan jatibarang;
kk. kecamatan songgom;
ll. kecamatan larangan;
mm. kecamatan ketanggungan;
nn. kecamatan kersana;
oo. kecamatan banjarharjo;
pp. kecamatan tonjong;
qq. kecamatan sirampog;
rr. kecamatan bumiayu;
ss. kecamatan bantarkawung;
tt. kecamatan paguyangan; dan
uu. kecamatan salem.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001

BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2025

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Daerah ke dalam rencana kerja jangka menengah PD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan strategis yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Renstra PD Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan tantangan, seperti perubahan regulasi nasional, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, sebagai pedoman utama dalam pencapaian target pembangunan Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

B. Tahapan Penyusunan Renstra PD

Renstra PD 2025-2029 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data dan Informasi

   Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra PD mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

   a. kondisi pelayanan PD;
   b. organisasi dan tatalaksana PD;
   c. hasil evaluasi kinerja pelayanan PD dan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya;
   d. peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan PD;
   e. pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan PD;
   f. RPJMD Tahun 2025-2029; dan
   g. informasi lain terkait pelayanan PD.

2. Analisis Gambaran Pelayanan PD

   Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan PD meliputi:

   a. menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur PD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
   b. mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
   c. menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan PD capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya; dan
   d. mengulas kelompok sasaran pelayanan PD.

3. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis PD

   Perumusan permasalahan dan isu strategis PD mencakup:

   a. analisis permasalahan pelayanan PD yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja PD yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja PD; dan
   b. menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Perumusan Tujuan dan Sasaran

   Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD mencakup:

   a. perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja PD mengacu RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029; dan
   b. penyusunan *cascading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome, output*, serta indikatornya.

5. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

   Memuat tentang strategi dan arah kebijakan PD guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029.

6. Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

   Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD berdasarkan program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

7. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

   Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup:

   a. menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui indikator kinerja utama PD; dan
   b. menentukan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci maupun indikator standar pelayanan minimal.

8. Penyempurnaan Renstra PD

   Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan:

   a. hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
   b. hasil *reviu* Rancangan Akhir Renstra PD oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9. Penetapan Renstra PD

   Penetapan Renstra PD dilaksanakan setelah RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

RENSTRA PD

TAHUN 2025-2029

Daftar Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
1.	sekretariat Daerah;
2.	sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
3.	inspektorat Daerah;
4.	badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
5.	badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
6.	badan pendapatan Daerah;
7.	badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
8.	badan penanggulangan bencana Daerah;
9	badan kesatuan bangsa dan politik;
10	satuan polisi pamong praja;
11	dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
12	dinas kesehatan Daerah;
13	dinas pekerjaan umum;
14	dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
15	dinas pengeloaan sumber daya air dan tata ruang;
16	dinas sosial;
17	dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18	dinas lingkungan hidup;
19	dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
20	dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
21	dinas perhubungan;
22	dinas komunikasi, informatika dan statistik;
23	dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
24	dinas kearsipan dan perpustakaan;
25	dinas kebudayaan dan pariwisata;
26	dinas pertanian dan ketahanan pangan;
27	dinas perikanan;
28	dinas peternakan dan kesehatan hewan;
29	dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
30	dinas perindustrian dan tenaga kerja;
31	kecamatan brebes;
32	kecamatan wanasari;
33	kecamatan bulakamba;
34	kecamatan tanjung;
35	kecamatan losari;
36	kecamatan jatibarang;
37	kecamatan songgom;
38	kecamatan larangan;
39	kecamatan ketanggungan;
40	kecamatan kersana;
41	kecamatan banjarharjo;
42	kecamatan tonjong;
43	kecamatan sirampog;
44	kecamatan bumiayu;
45	kecamatan bantarkawung;
46	kecamatan paguyangan; dan
47	kecamatan salem.

Kab.Brebes
Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III

PENUTUP

Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang tumbuh berkembang di Daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN DAERAH
Jalan DR. Wahidin Nomor 02 Telepon (0283) 671846 Faksimile (0283) 672125
Laman: dinkes.brebeskab.go.id, Pos-el: dinkes@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 06750 /360.2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan mandat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Brebes tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029.

b. Bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950)

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
6. Undang – undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi,

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.10 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes;
19. Peraturan Daerah Kapupaten Brebes No.4 Tahun 2025 Tentng Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Brebes Tahun 2025 -2029
20. Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas Di Kabupaten Brebes
21. Peraturan Bupati Brebes Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kesehatan Daerah (Renstra Dinkesda) Kabupaten Brebes Tahun 2025 - 2029.

KETIGA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (Renstra Dinkesda) Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029 meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang, Landasan Hukum,
   B. Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
   2.1 Gambaran pelayanan Dinkesda Kab. Brebes
      A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
      B. Sumber Daya Perangkat Daerah,
      C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
      D. Kelompok Sasaran Layanan Dinkesda
      E. Mitra Kerja Dinkesda
      F. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja
      G. Kerjasama Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
B. Penentuan Isu – isu Strategis

c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN
   A. Tujuan
   B. Sasaran
   C. Strategi dan Arah Kebijakan
d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG KESEHATAN
   A. Program, Kegiatan, dan subkegiatan
   B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkesda Kab. Brebes
   C. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkesda Kab. Brebes
e. BAB V : PENUTUP

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 19 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, S.KM.,M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19710214 199503 2001

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
Jalan dr. Wahidin Nomor 02 Telepon (0283) 671846 Faksimile (0283) 672125
Laman: dinkes.brebeskab.go.id, Pos-el: dinkes@brebeskab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
NOMOR 02344/360.2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. Bahwa sehubungan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahun kedepan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangakat Daerah.

b. Bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik tahun 2004 No.104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421)

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)

5. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114).
6. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES, DENGAN SUSUNAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI;

PERTAMA :

1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan Pembahasan Pengolahan Data dan Informasi, Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
3. Melakukan Pengkajian Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
4. Melaksanakan Penentuan Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
5. Melaksanakan Penelaahan Rancangan Awal dan Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
6. Melaksanakan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;

7. Melaksanaka Penajaman Terhadap Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
8. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian sasaran Sesuai dengan Kewenangan dan Sinergitas Pelaksanaan atas Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;
9. Melaksanakan Penentuan Sasaran dan Kegiatan PD disusun berdasarkan Pendekatam Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2025 – 2029 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 14 April 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, S.KM.,M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19710214 199503 2001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 02344 / 360.2 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

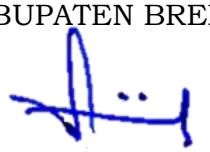
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025 – 2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Ineke Tri Sulistyowaty, SKM,M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
2	Imam Budi Santoso, S.ST.,MH.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	Ketua
3	dr. Ign. Adhi Pujo Astowo	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Wakil Ketua I
4	Sri Nani Purwaningrum, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Wakil Ketua II
5	dr. Arlinda Rosmelani	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Wakil Ketua III
6	Budi Listyani, S.KM	Ka Subbag Program dan Keuangan	Sekretaris
7	Ariani Kusumasari, S.E	Pengelola Keuangan	Anggota
8	Tri Kurniati, S.KM	Ka Subbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
9	Rizkiatur Rofi'ah, A.Md AK	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
10	Nur Farikhah, S.KM	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
11	Deny Ardi Lourina, S.KM., M.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
12	Dyah Astutiningrum, S.KM., M.PH.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
13	Tanty Indah Sulistyowati, S.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
14	Neny Diana, S.KM., M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
15	Ida Royani, S.KM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Anggota
16	Junaetin, S.KM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
17	Fatqiyatu Rohmah, S.KM, M.PH	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
18	Agus Riyanto, S.KM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
19	Anggia Rahmadian W, S.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
20	Emi Sri Hartati, S.KM.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
21	Laeli Apriyanti, S.KM., M.Kes	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
22	Cuciatun Ningrum, S.KM	Sanitarian Ahli Muda	Anggota
23	Nurul Aeni, S.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
24	Retno Dewi Anggraeni, S.KM, M.Kes	Analis Kesehatan Ibu Dan Anak	Anggota
25	Wanda Aryani, Amd.Keb	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	Anggota
26	Ely Atmirasih, S.KM	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
27	Widya Ariesanti, S.KM	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
28	Haditopo, S.si.APT	Apoteker Ahli Muda	Anggota
29	Yulianti Salim, S.si, Apt	Apoteker Ahli Madya	Anggota
30	Lulu Khoirunnisa, M.Clin Pharm	Apoteker Ahli Madya	Anggota
31	Nurul Mutmainnah, S.KM., M.PH	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
32	Dede Pertiwi Asih, A.Md	Pengelola Keuangan	Anggota
33	Fahmi Riza S, S.Kom	Staff Subbag Program dan Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, S.KM.,M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19710214 199503 2001

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Perda No. 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan penekanan pada pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Brebes. Rencana pembangunan kesehatan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Dokumen Renstra ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dalam upaya melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

Dengan segala kerendahan hati, kami senantiasa mengharap rahmat dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberi kekuatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Brebes guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Amin

Brebes, 19 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Brebes



Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710214 199503 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i
Daftar Isi.....ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan.....4
1.4 Sistematika Penulisan.....4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH..... 8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah.....8
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....8
B. Sumber Daya Dinas Kesehatan Daerah.....18
C. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah.....20
D. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan Daerah.....27
E. Mitra Kerja Dinas Kesehatan Daerah dalam Memberikan Pelayanan.....28
F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja.....31
G. Kerjasama Daerah.....32
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Daerah.....32
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....33
B. Penentuan Isu-isu Strategis.....45

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN.....48
3.1 Tujuan.....52
3.2 Sasaran.....53
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....54

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN.....64
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....64
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkesda Kabupaten Brebes.....132
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkesda Kabupaten Brebes.....133

BAB V PENUTUP..... 135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Fasilitas Kesehatan..... 18

Tabel 2.2 Sarana fasilitas Kesehatan di Kabupaten Brebes Berdasarkan Kepemilikan Pengelola.....19

Tabel 2.3 Rekap Kertas Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2024 19

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020–2024.....22

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan daerah tahun 2020-2024..... 25

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....27

Tabel 2.7 Permasalahan–permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....34

Tabel 3.1 Rumusan Visi Kepala daerah Kabupaten Brebes.....48

Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030.....53

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes 2025-2030.....56

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....66

Tabel 4.2 Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....97

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....126

Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....132

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.....10

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kerja Puskesmas se-Kabupaten Brebes.....17

Gambar 2.3 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.....26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang - Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 tahun. Rencana pembangunan daerah tersebut menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Brebes sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional, yang hakikatnya merupakan suatu proses bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penataan sistem pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab Dinas Kesehatan mengawalinya dengan perencanaan berkualitas dengan memperhatikan visi yang akan dicapai, misi yang akan dijalankan dan prioritas strategi yang telah ditetapkan disertai rencana pengukuran kinerja dari setiap kegiatan yang akan direncanakan. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 - 2029 yang merupakan proses penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan tujuan, sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes khususnya. Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. Perumusan rancangan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dimulai dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes adalah salah satu usaha untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan Kabupaten Brebes yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Brebes, salah satu indikator pembangunan Kabupaten Brebes yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan tercantum dalam Renstra Dinkes adalah Umur Harapan Hidup, dan Prevalensi Stunting. Untuk isu – isu kesehatan yang tercantum dalam Renstra Kabupaten Brebes harus sesuai atau sejalan dengan isu-isu kesehatan yang dibahas oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian setiap isu kesehatan harus ada keselarasan dalam setiap langkahnya. Isu utama yang menjadi pembahasan baik itu di pusat, provinsi atau daerah adalah tentang Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Anak dan Balita, Stunting dan Gizi Buruk, Penyakit menular dan tidak menular serta program kesehatan yang sedang di gerakan secara massif seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Cek Kesehatan Gratis, dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 adalah memberikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Pelaksanaan Pembangunan selama lima tahun dan menjadi dasar dalam Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah bagi pembangunan kesehatan serta merupakan pedoman teknis dan strategi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 mengacu pada Kepmendagri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Selanjutnya disempurnakan oleh Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Maka Sistematika penulisan Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deskripsi singkat mengenai rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes secara umum; Fungsi rencana strategis dalam pembangunan daerah; Proses penyusunan rencana strategis; Hubungan keterkaitan rencana strategis dengan RPD, rencana strategis kementerian/lembaga serta rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Berisi mengenai Regulasi tentang tugas fungsi dan kewenangan perangkat daerah; Regulasi tentang perencanaan pembangunan yang berkaitan langsung dengan Renstra, baik pusat maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berisi mengenai Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Berisi mengenai deskripsi singkat tiap bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Deskripsi singkat mengenai Uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes; Penjabaran mengenai Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes beserta bagian dan fungsi tugasnya

B. Sumber Daya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Berisi kondisi sumber daya yang tersedia di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes; Mengetahui kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten berdasarkan Kepemilikan/Pengelola

C. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
   Menunjukan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya
D. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
E. Mitra Kerja Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan
F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
G. Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
B. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai, condong pada program dan kegiatan.

3.1. Tujuan
3.2. Sasaran
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan
   Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah, perlu didukung adanya Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Maka, nomenklatur Dinas Kesehatan yang semula adalah Dinas Kesehatan Kabupaten, menjadi Dinas Kesehatan Daerah Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas. Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, maka Tugas Dinas Kesehatan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kesehatan.

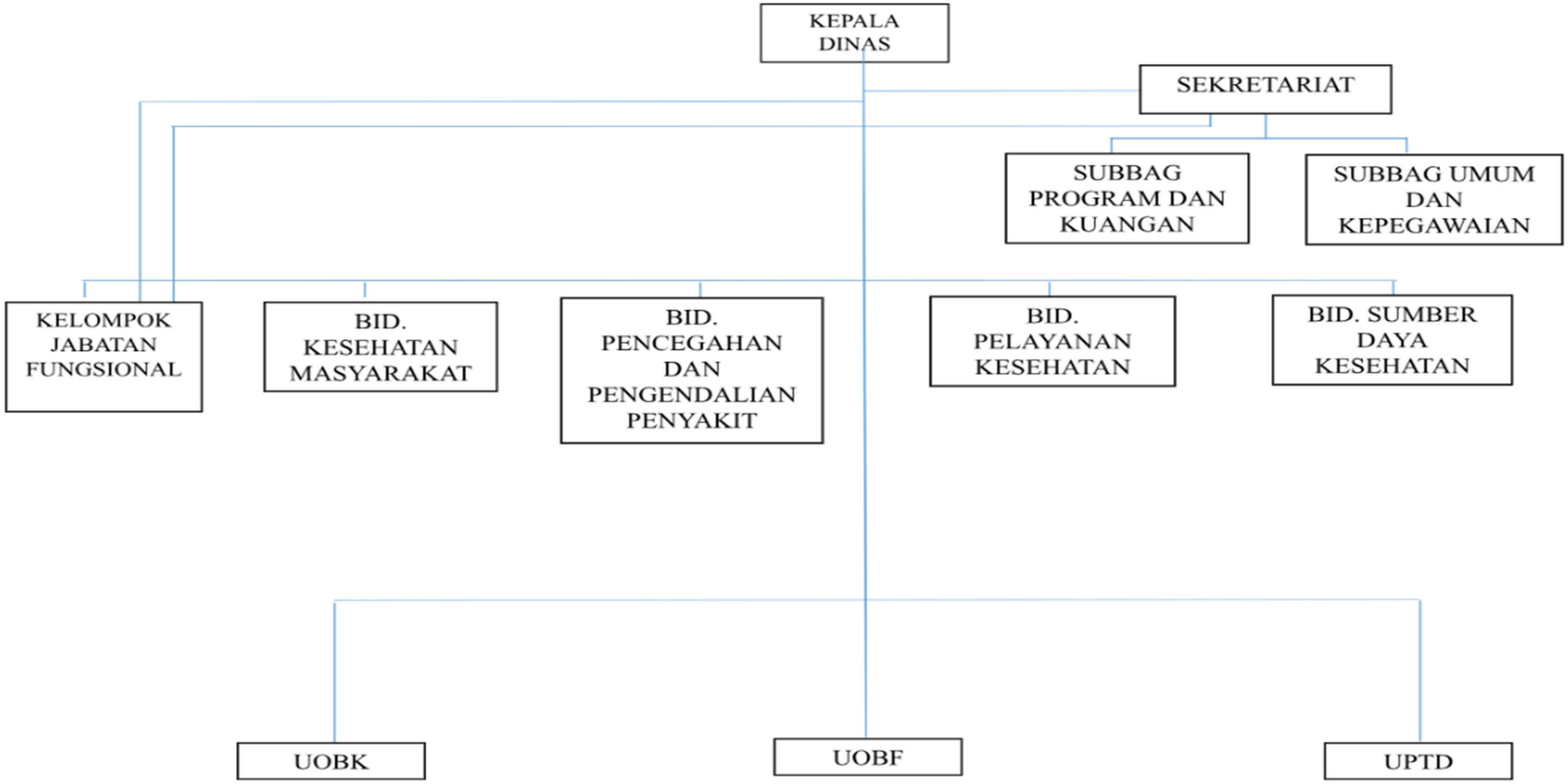
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian dan

alat Kesehatan, pendanaan Kesehatan, dan sumber daya manusia Kesehatan;

b. Pelaksana kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan, pendanaan Kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan, pendanaan Kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan, pendanaan Kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Kesehatan Daerah;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes



Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Kesehatan Masyarakat
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
e. Bidang Pelayanan Kesehatan
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
g. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)
h. Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF)
i. UPTD, dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun masing-masing tugas dan fungsi bidang maupun sekretariat terdiri dari dua sub bagian sebagai berikut:

a. Sekretariat

   mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
   2) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
   3) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
   4) fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum Daerah;
   5) penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
   6) koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
   7) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
   8) pengelolaan sumber daya manusia;
   9) pengelolaan hubungan masyarakat;
   10) pengelolaan data dan sistem informasi;
   11) koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
   12) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
   13) pelaksanaan urusan administrasi; dan

14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Sekretariat terdiri dari:

1) Subbagian Program Dan Keuangan, yang bertugas:
   Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasiaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.
2) Subbagian Umum Dan Kepegawaain, bertugas :
   Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
2) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
3) pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
4) pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
5) pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
6) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
7) pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
8) fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;

9) penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan tradisional;
10) penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
11) perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
12) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
13) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
14) pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bidang pencegahan dan pengendalian penyakit melaksanakan fungsi:

1) pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
2) pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
3) pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
4) advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
5) pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
6) pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi;
7) koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
8) pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
9) pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
10) pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan

lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

11) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
12) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
13) pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, bidang pelayanan kesehatan melaksanakan fungsi:

1) pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
2) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
3) pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
4) pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
5) fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
6) pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
7) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
8) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
9) pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan; dan
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, bidang sumber daya kesehatan melaksanakan fungsi:

1) pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
2) pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
3) pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
4) pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
5) pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
6) peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
7) pengelolaan pendanaan kesehatan;
8) perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
9) peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
10) pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
11) pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
12) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
13) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
14) pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. UPTD, UOBK, dan UOBF

Pada Dinas Kesehatan Daerah terdapat rumah sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan pusat kesehatan masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang memberikan layanan secara profesional.

1) Unit organisasi bersifat khusus (UOBK) terdiri dari:
   Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
   Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu
   Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno di wilayah Ketanggungan
2) Unit Organisasi Bersifat Fungsional Terdiri dari,
   1. UOBF Puskesmas Salem
   2. UOBF Puskesmas Bentar
   3. UOBF Puskesmas Bantarkawung
   4. UOBF Puskesmas Buaran

5. UOBF Puskesmas Bumiayu
6. UOBF Puskesmas Kaliwadas
7. UOBF Puskesmas Paguyangan
8. UOBF Puskesmas Winduaji
9. UOBF Puskesmas Sirampog
10. UOBF Puskesmas Tonjong
11. UOBF Puskesmas Kutamendala
12. UOBF Puskesmas Larangan
13. UOBF Puskesmas Sitanggal
14. UOBF Puskesmas Ketanggungan
15. UOBF Puskesmas Cikeusal Kidul
16. UOBF Puskesmas Banjarharjo
17. UOBF Puskesmas Bandungsari
18. UOBF Puskesmas Cikakak
19. UOBF Puskesmas Losari
20. UOBF Puskesmas Bojongsari
21. UOBF Puskesmas Kecipir
22. UOBF Puskesmas Tanjung
23. UOBF Puskesmas Kemurang Wetan
24. UOBF Puskesmas Luwunggede
25. UOBF Puskesmas Kersana
26. UOBF Puskesmas Kluwut
27. UOBF Puskesmas Bulakamba
28. UOBF Puskesmas Siwuluh
29. UOBF Puskesmas Wanasari
30. UOBF Puskesmas Jagalempeni
31. UOBF Puskesmas Sidamulya
32. UOBF Puskesmas Jatirokeh
33. UOBF Puskesmas Jatibarang
34. UOBF Puskesmas Klikiran
35. UOBF Puskesmas Brebes
36. UOBF Puskesmas Pemaron
37. UOBF Puskesmas Kalimati
38. UOBF Puskesmas Kaligangsa

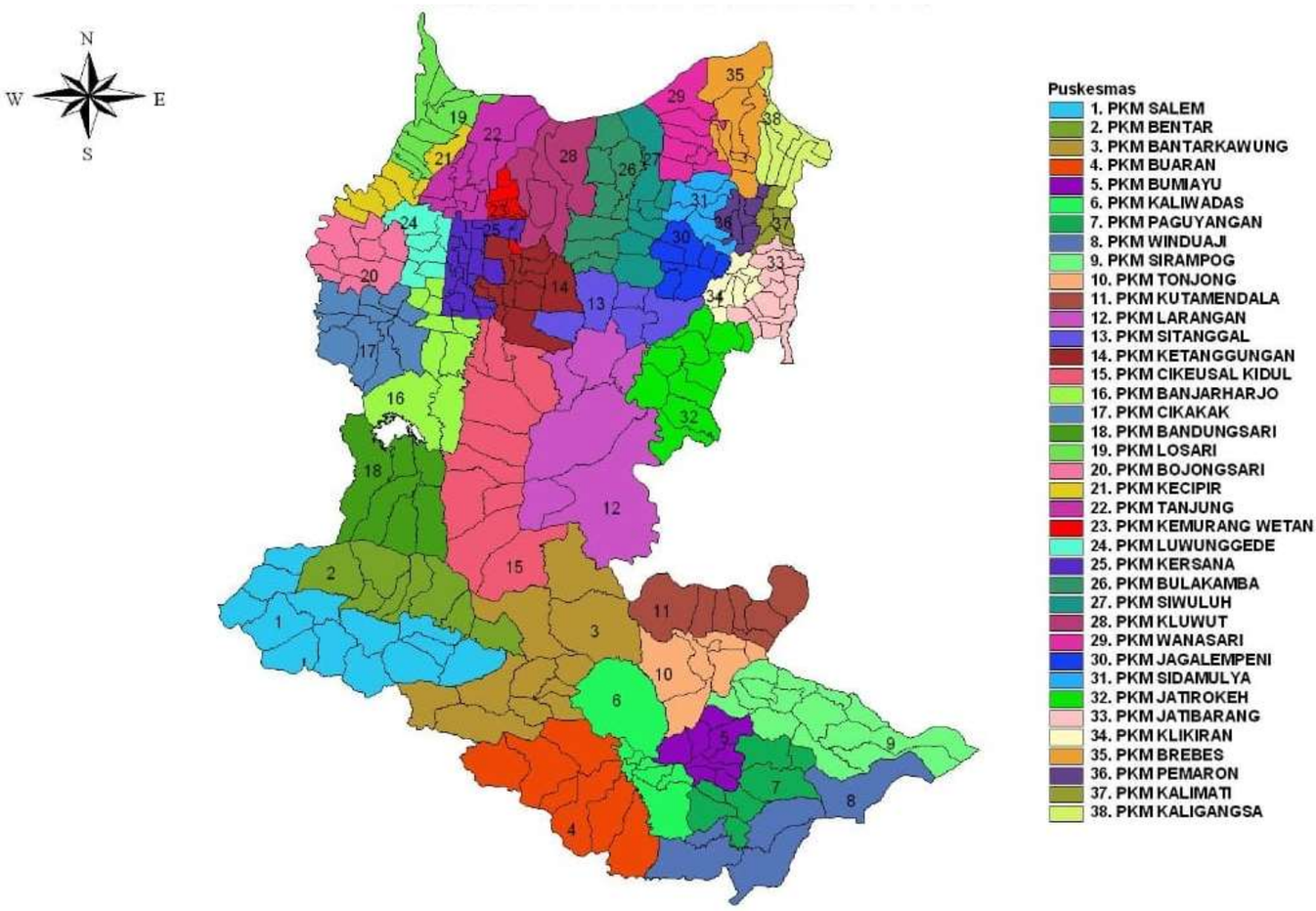
Adapun peta wilayah kerja puskesmas seKabupaten Brebes dapat dilihat pada Gambar 2.2.

3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

UPTD Klinik Pengobatan Paru Dan Kusta

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kerja Puskesmas se-Kabupaten Brebes



g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2) Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
4) Ketua tim; dan
5) Anggota tim.
    a) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

b) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Kondisi sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan pendataan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Tenaga Medis	Jumlah
Dokter Spesialis	256
Dokter Umum	253
Dokter Gigi	55
Dokter Spesialis Gigi & Sub Spesialis Gigi	2
Bidan	1.409
Perawat	1.781
Tenaga Teknis Kefarmasian	207
Apoteker	99
Kesehatan Masyarakat	93
Kesehatan Lingkungan	78
Gizi	99
Keterapian Fisik	33
Keteknisian Medis	232
Teknisi Biomedika Lainnya	83
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	187
Terapi Okupasi	3
Terapi Wicara	3
Radiografer	62
Terapis Gigi dan Mulut	63
Analis Kesehatan	208
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	108
Refraksionis Optisien	4

Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan pendataan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Brebes Berdasarkan Kepemilikan/Pengelola

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola						
		Kemenkes	Pem. Prov	Pem.Kab/ Kota	TNI/ Polri	BUMN	Swasta	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Rumah Sakit								
1	Rumah Sakit Umum			3			11	14
2	Rumah Sakit Khusus			0			2	2
Puskesmas Dan Jaringannya								
1	Puskesmas Rawat Inap			23				23
	- Jumlah Tempat Tidur			289				289
2	Puskesmas Non Rawat Inap			15				15
3	Puskesmas Keliling			38				38
4	Puskesmas Pembantu			59				59
Sarana Pelayanan Lain								
1	Rumah Bersalin						0	0
2	Klinik Pratama						60	60
3	Klinik Utama						10	10
4	TPM Dokter						179	1
5	TPM Dokter Gigi						27	27
6	TPM Dokter Spesialis						13	13
7	TPM Bidan						617	617
8	TPM Perawat						292	292
9	Griya Sehat						6	6
10	Unit Transfusi Darah			1				1
11	Laboratorium Kesehatan			1				1
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian								
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)						3	3
2	Apotek			1			233	234
3	Toko Obat						4	4
4	Toko Alat Kesehatan						2	2

Tabel 2.3. Rekap Kertas Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2024

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	**TANAH**	**997.176.000**
	Tanah Persil	289.800.000
	Tanah Non Persil	707.376.000
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**22.322.345.432**
	a. Alat-alat Besar	649.224.863
	b. Alat-alat Angkutan	4.227.502.202
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	11.945.186

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
	d. Alat-alat Pertanian	4.922.300
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	4.190.062.819
	f. Alat-alat Studio, Komunikasi dan pemancar	790.617.947
	g. Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	1.235.085.332
	h. Alat-alat Laboratorium	7.407.351.512
	i. Alat-alat Persenjataan	4.247.500
	j. Komputer	3.777.935.771
	k. Alat Eksplorasi	-
	l. Alat Pengeboran	-
	m. Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-
	n. Alat bantu Eksplorasi	-
	o. Alat Keselamatan Kerja	23.450.000
	p. Alat Peraga	-
	q. Peralatan Proses/Produksi	-
	r. Rambu-rambu	-
	s. Peralatan Olahraga	-
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**18.720.397.396**
	a. Bangunan Gedung	18.672.899.396
	b. Bangunan Monumen	-
	c. Bangunan Menara	-
	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	47.498.000
4	**JALAN IRIGASI DAN JARINGAN**	**84.218.962**
	a. Jalan dan Jembatan	-
	b. Bangunan Air / Irigasi	-
	c. Instalasi	31.268.962
	d. Jaringan	52.950.000
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**994.327.040**
	a. Buku Perpustakaan	994.327.040
	b. Barang Bercorak Kesenian	-
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-
6	**KONSTRUKSI DLM PENGERJAAN**	**66.570.000**
	Konstruksi dalam pengerjaan	66.570.000
	Jumlah	**43.185.034.830**
	ASET LAINNYA	**3.215.466.825**
1	**Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**	**0**
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
2	**Aset Tidak Berwujud**	**437.742.105**
	Aset Tidak Berwujud	437.742.105
3	**Aset Lain-Lain**	**2.777.724.720**
	Aset Lain-Lain	2.777.724.720

C. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan kesehatan,

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Selama tahun 2024, Dinas Kesehatan Daerah telah mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Meskipun masih ada realisasi capaian Indikator yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan tetapi hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 sasaran dengan menggunakan 10 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024. Dari 10 indikator terdapat 7 (tujuh) indikator melampaui target, yaitu Kasus Kematian Ibu, Pelayanan Kesehatan Lansia, Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza, Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Menular Vektor/Zoonosis, Angka Kesakitan dan Kematian PD3I, Desa Siaga Aktif Mandiri, dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Sedangkan tiga indikator yang belum mencapai target, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A.	**Renstra PD Tahun 2017-2022**																
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	%	92	94	96			96,9	88,52	86,65			96,9	94,2	90,26		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	%	96	97	98			103,6	99,60	99,71			103,6	102,7	101,74		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (%)	%	96	97	98			102,3	98,40	98,02			102,3	101,4	100,02		
4	Pelayanan Kesehatan Balita (%)	%	92	93	94			84,7	79,68	84,32			84,7	85,7	89,70		
5	Cakupan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar (%)	%	84	86	88			66,7	79,33	88,09			66,7	92,2	100,1		
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif (%)	%	78	79	80			25,5	33,95	51,46			25,5	43	64,32		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)	%	44	46	50			76,2	46,22	61,72			76,2	100,5	123,44		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	%	100	100	100			25,6	38,60	40,35			25,6	38,6	40,35		

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus (%)	%	100	100	100			72,6	70,39	84,98			72,6	70,39	84,98		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%)	%	100	100	100			46,4	52,85	64,65			46,4	52,85	64,65		
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (%)	%	80	85	90			47,3	33,85	61,90			47,3	39,8	68,77		
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	%	75	80	85			98,5	71,08	90,12			98,5	88,85	106,02		
13	Kasus Kematian Ibu	%	30	29	28			0	103	50			0	-115,1	21,43		
14	AKB/100.000 KLH	100.000 Penduduk < 15 Tahun	12	11,5	11,5			120,8	9,45	9,2			120,8	117,8	120		
B.	**Renstra PD Tahun 2023-2026**																
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks				88	88,5				81,35	84,46				92,4	95,4
2.	Kasus Kematian Ibu	Kasus				85	75				54	54				136,47	128
3.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH				11,15	11,1				12,14	9,87				91,12	111,08
4.	Stunting	%				12	11,75				16,23	12,61				64,75	92,68
5.	Pelayanan Kesehatan Lansia	%				32,9	33				74,90	83,43				227,6	252,8

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Ketercapaian Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Dan Napza	%				60	65				62,86	68,29				104,77	105,06
7.	Ketercapaian Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dan Menular Vektor/ Zoonosis	%				72	77				93,12	79,23				129,33	102,89
8.	Angka Kesakitan dan Kematian PD3I	%				0	0				0	0				100	100
9.	Desa Siaga Aktif Mandiri	%				21	25				24,92	37,31				117,04	150,84
10.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	Indeks				86,8	86,9				87,62	88,16				100,94	101,45

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

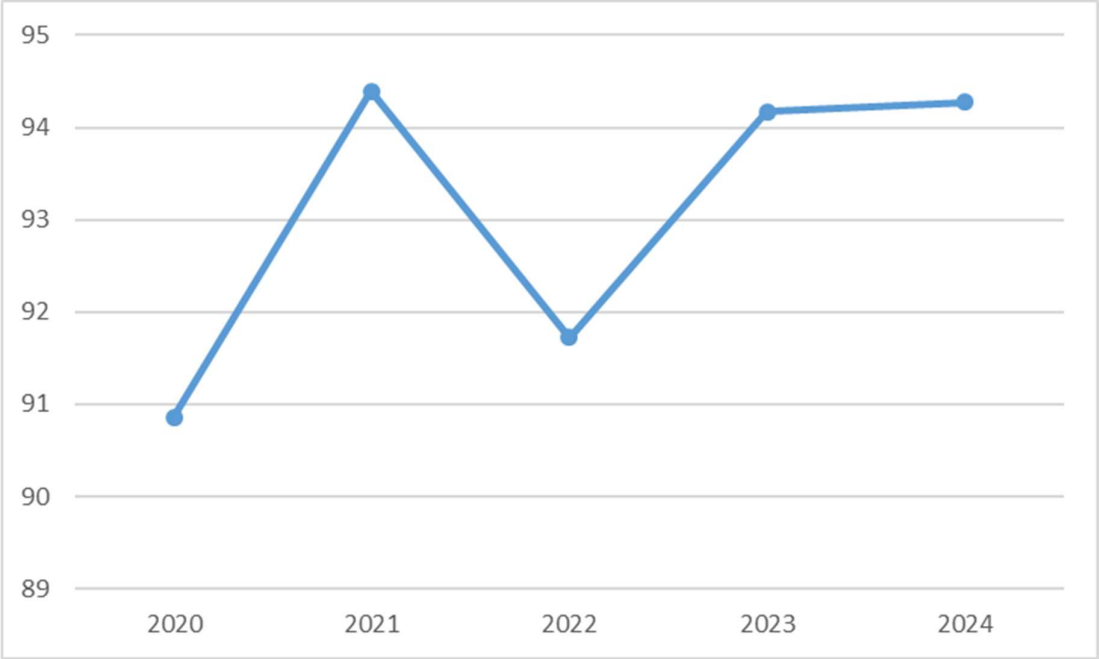
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pagu Anggaran (Rp)	195.025.115.056	211.251.781.520	191.671.419.368	218.290.822.305	224.849.703.752
2	Realisasi Anggaran (Rp)	177.215.908.056	199.393.836.255	175.798.353.873	205.563.471.002	211.971.344.059
3	Rasio Realisasi dan Anggaran (%)	90,86	94,39	91,72	94,17	94,27

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Besaran total persentase penyerapan anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dari Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan program dan tugas-tugas pokoknya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2020-2024



Gambar di atas menunjukkan total serapan anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024. Dibanding Tahun 2021, 2023, dan 2024, maka pada tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan persentase realisasi anggaran. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang memiliki realisasi keuangan yang rendah. Pada tahun 2020 terdapat dua kegiatan dengan realisasi rendah yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Peningkatan Mutu Kesehatan untuk Belanja Barang dan Jasa. Hal tersebut disebabkan rendahnya realisasi belanja jasa kegiatan insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19 fasilitas di kesehatan puskesmas dan rumah sakit yaitu sebesar Rp 8.032.045.455,- (53,1%) dari pagu anggaran Rp 15.126.750.000,- karena belanja jasa kegiatan insentif tenaga kesehatan untuk RS Swasta yang

semula dianggarkan melalui APBD dibebankan melalui anggaran DAK Non Fisik (BOK Tambahan).

Selanjutnya kegiatan yang memiliki realisasi rendah pada tahun 2022 yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp 11.047.150.000,- hanya dapat terealisasi sebesar Rp 4.861.150.520,- (44%). Rendahnya realisasi dikarenakan untuk anggaran DAK Non Fisik (BOK) di SIPD tertera Rp 10.737.781.000,- namun dana yang disetujui oleh Kemenkes hanya sebesar Rp.5.490.240.000.- Realisasi Keuangan dari dana yang tersedia adalah 83,90%, sedangkan realisasi fisik adalah 100%.

D. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes termasuk UPTD yaitu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat pada semua kelompok umur. Berikut adalah jenis pelayanan dan program pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes beserta kelompok sasarannya.

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

No.	Program	Kelompok Sasaran
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu hamil
		Ibu bersalin
		Bayi usia 0-28 hari
		Balita berusia 0-59 bulan
		Anak sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 9
		Usia produktif (berusia 15-59 tahun)
		Usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih)
		Penderita Hipertensi
		Penderita Diabetes Melitus
		ODGJ Berat
		Orang terduga tuberkulosis
		Orang dengan risiko terinfeksi HIV
		Pelaku usaha fasilitas pelayanan kesehatan
2.	Pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Pelaku usaha pangan
		Pelaku usaha apotek dan toko obat
		Apoteker dan tenaga kefarmasian
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Tenaga kesehatan
4.	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Masyarakat umum

E. Mitra Kerja Dinas Kesehatan Daerah dalam Memberikan Pelayanan

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

   BPJS Menjadi Layanan Mitra Dinas Kesehatan Daerah dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat, baik secara mandiri maupun PBI dengan sinergi yang baik, dapat mencapai tujuan bersama dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Brebes serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJS selaku mitra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes untuk memastikan setiap orang mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata tanpa terhalang biaya, dengan prinsip gotong royong.

2. Rumah Sakit Swasta

   Di Kabupaten Brebes terdapat 13 Rumah Sakit Swasta yang merupakan Rumah Sakit rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Rumah Sakit swasta ini menjadi mitra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dalam memberikan layanan Kesehatan pada masyarakat kabupaten Brebes dan memastikan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Swasta sesuai dengan standar dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Rumah Sakit Swasta siap untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah dalam membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

   Dinas Kesehatan Daerah bermitra dengan BPOM dalam pembinaan, pengawasan dan pemenuhan komitmen pelaku usaha produksi pangan industri rumah tangga.

4. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

   Kabupaten Brebes memiliki empat apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian bagi Pasien PRB (Program Rujuk Balik). Total terdapat 413 apotik dan 26 toko obat yang memiliki izin dan melaksanakan pelayanan kefarmasian.

5. Penyehat Tradisional

   Dinas Kesehatan Daerah juga bermitra dengan penyehat tradisional dalam memperkuat sistem kesehatan nasional daerah. Penyehat tradisional menyediakan opsi pelayanan di luar pelayanan kesehatan konvensional berdasarkan keterampilan ataupun pengalaman turun temurun. Terdapat 24 penyehat tradisional yang sudah memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

6. Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Asosiasi Tenaga Kesehatan, serta Penyehat Tradisional

   Untuk mendukung pelaksanaan program JKN serta memastikan seluruh tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki izin dan memiliki kompetensi sesuai ketentuan, Dinas Kesehatan Daerah bermitra dengan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Asosiasi Tenaga Kesehatan dan Asosiasi Penyehat Tradisional. Total terdapat dua Asosiasi Faskes baik FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) ataupun FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), 16 Asosiasi Tenaga Kesehatan dan empat Asosiasi Penyehat Tradisional yang mendukung pelaksanaan program JKN ataupun perizinan sektor kesehatan.

7. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

   Baznas menjadi mitra Dinas Kesehatan Daerah dalam hal memberikan bantuan untuk masyarakat tidak mampu baik dalam pelayanan rujukan serta bantuan untuk hidup sehari hari.

8. Unit Donor Darah (UDD) PMI Kab. Brebes

   UDD PMI Kab. Brebes dengan RS di Kab.Brebes bermitra dalam hal ini terkait Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Brebes.

9. Bio Farma

   Bio Farma sebagai laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan sampel penyakit pada informasi yang tersedia. Fokusnya adalah pada pelayanan laboratorium klinik umum, riset dan pengembangan vaksin, serta pelayanan kesehatan masyarakat seperti klinik dan imunisasi. Informasi ini menunjukkan Bio Farma memiliki laboratorium klinik yang canggih dan mendukung riset, tetapi tidak

secara langsung menyatakan fungsinya sebagai rujukan nasional pemeriksaan sampel spesifik penyakit secara luas.

10. Organisasi Perangkat Daerah

    Dinas Kesehatan Daerah menjalankan berbagai aktivitas dengan OPD lain untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Kolaborasi ini sangat penting karena masalah kesehatan seringkali kompleks dan membutuhkan pendekatan multi-sektor. Dinas Kesehatan Daerah dalam hal ini bermitra dengan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR), Camat, dan Kepala Desa/Lurah. Selain OPD di wilayah Kabupaten Brebes, Dinas Kesehatan Daerah juga bermitra dengan OPD Tingkat Provinsi maupun Pusat untuk memastikan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai ketentuan.

11. Komunitas

    Di Kabupaten Brebes terdapat satu komunitas yang melakukan kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian TBC di Kabupaten Brebes. Komunitas tersebut adalah Mentari Sehat Indonesia (MSI) yang memiliki peran dalam membantu kegiatan penemuan kasus TB pada kelompok khusus berisiko TBC, melakukan kegiatan pendampingan sebagai Pendamping Minum Obat (PMO) pada pasien TBC supaya tidak putus berobat dan pengobatan dilakukan sampai sembuh, selain itu MSI juga melakukan pelacakan pasien TB yang mangkir supaya dapat melanjutkan pengobatannya.

12. Organisasi Profesi

    Dinas Kesehatan Daerah bermitra dengan 16 Organisasi Profesi Kesehatan, yaitu IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI, PAFI, IPAI, Persagi, Hakli,

Patelki, Pormiki, PARI, IAKMI, PPPKMI, IFI, PTGMI guna mendukung kegiatan dan program di bidang kesehatan.

13. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

    Di Kabupaten Brebes terdapat 2 (dua) LSM yang melakukan kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Kabupaten Brebes. Kedua LMS tersebut adalah Yayasan TEKAD dan Yayasan PEKA, Yayasan TEKAD membantu dalam kegiatan penjangkauan lapangan pada kelompok beresiko terinfeksi HIV untuk dapat mengakses konseling testing di fasilitas Kesehatan di Kabupaten Brebes melalui kegiatan tes secara mobile, kunjungan rumah dan datang langsung ke fasilitas Kesehatan. Yayasan PEKA membantu dalam kegiatan pendampingan kepada Orang dengan HIV (ODHIV), memutuskan rantai penularan HIV AIDS melalui pemeriksaan berkala dan pengobatan bagi ODHIV serta meningkatkan kualitas hidup bagi ODHIV.

F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Dukungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terhadap Dinas Kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah beberapa cara dimana PDAM dapat memberikan dukungan terhadap Dinas Kesehatan Daerah:

1) Penyediaan Air Bersih yang Berkualitas: PDAM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa air yang disediakan sesuai dengan standar kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk standar yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Daerah.
2) Kerjasama dalam Survei Kualitas Air: PDAM dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan survei kualitas air bersih dan memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kualitas air yang ditentukan oleh pemerintah.
3) Edukasi Kesehatan: PDAM dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih bagi kesehatan dan bagaimana menjaga kualitas air yang dikonsumsi. Ini dapat dilakukan

dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan relevan.

4) Penanggulangan Wabah Penyakit: PDAM dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah dalam penanggulangan wabah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tidak bersih. Antara lain meliputi peningkatan monitoring kualitas air, peningkatan pemeliharaan jaringan distribusi air bersih, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih bagi kesehatan.

Dengan dukungan PDAM, Dinas Kesehatan Daerah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi, yang merupakan faktor penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

G. Kerjasama Daerah

Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan kerjasama dalam penyediaan barang dan jasa, antara lain:

1. Penyediaan Jasa Infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan pembangunan maupun renovasi gedung pelayanan kesehatan;
2. Kerjasama dalam penyediaan barang dan jasa melalui *Inaproc* atau manajemen akun terpusat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan portal pengadaan Nasional, yang menjadi pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
3. Kerjasama dalam pengadaan langganan SIMPUS Puskesmas. Simpus adalah program aplikasi yang dikembangkan khusus dari puskesmas, untuk puskesmas dengan melihat kebutuhan dan kemampuan puskesmas dalam mengelola, mengolah, dan memelihara data-data yang ada;
4. Dalam pelaksanaan Program JKN, Dinas Kesehatan Daerah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kerjasama ini terutama terkait pengelolaan segmen peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;

5. Dinas Kesehatan Daerah juga bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pelayanan kependudukan Bayi Baru Lahir untuk memastikan BBL tersebut memiliki data kependudukan yang valid sehingga nantinya dapat didaftarkan menjadi peserta JKN;
6. Kerjasama dengan Yayasan Noora Health Indonesia tahun 2025-2027 dengan Perjanjian MOU nomor 440/299/2025 tertanggal 6 Februari 2025 perihal Program Edukasi dan Pendampingan pengasuh keluarga di Kabupaten Brebes;
7. Kerjasama dengan Yayasan Project HOPE Jakarta tahun 2025-2027 perihal *Improving Care of Mothers and Infant through Infection Prevention Control and Sepsis Prevention (I-CARE);*
8. Kerjasama Program SIGAP tahun 2024-2026 perihal promosi kesehatan dan gizi meliputi Imunisasi, CTPS, dan makanan bergizi yang baik bagi anak.
9. Kerjasama dengan akademisi/universitas untuk mendukung kegiatan dan program kesehatan serta kegiatan penelitian kesehatan.
10. Kerjasama dengan Bapelkes dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) melalui pelatihan tenaga kesehatan.

2.2. Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Dinas Kesehatan Daerah

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes disusun dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan strategis dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil dan kinerja yang telah dicapai selama ini dibandingkan dengan target dan standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang sudah ditetapkan. Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi. Tujuannya adalah agar perencanaan strategis yang disusun dapat

bersinergi dan memberikan kontribusi yang besar dalam pemecahan permasalahan pembangunan di Kabupaten Brebes.

Selanjutnya permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.7
Permasalahan-permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka absolut Kematian Ibu dan Kematian Bayi yang masih tinggi di wilayah Jateng	Jumlah penduduk dan jumlah sasaran bumil paling besar di Jateng	- Keterbatasan finansial - Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah berpengaruh pada keterlambatan keputusan rujukan, baik rujukan ANC maupun rujukan hamil atau nifas (biaya lain di luar tanggungan BPJS PBI; transport PP ke RS, biaya anak yang di tinggal di rumah – pada keluarga dengan upah satu hari untuk makan hari itu) - Pengetahuan / pendidikan ibu dan keluarga yang masih rendah. Edukasi kesehatan untuk rujukan harus lebih kuat, kepekaan atau awareness keluarga yang masih kurang untuk tanda bahaya pada bumil, bulin dan bufas untuk segera dirujuk sebelum ada perburukan - Kualitas pelayanan di FKTP dan FKTL serta tindak lanjutnya masih perlu dioptimalkan - Keterlibatan semua sektor yang mendukung kondisi ibu hamil, bersalin, dan nifas agar mendapat pertolongan sebelum terjadi perburukan/ kondisi kesehatan yang sudah menurun

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Stunting dan Gizi Kurang	Jumlah balita dengan sasaran yang banyak di Jawa Tengah dan pola asuhnya	- Keterbatasan finansial - Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah berpengaruh pada pemenuhan konsumsi keluarga, kurang rujukan RS (biaya lain di luar tanggungan BPJS PBI; seperti transport PP ke RS, biaya anak yang di tinggal di rumah serta living cost keluarga yang nunggu di RS) - Pengetahuan / pendidikan ibu dan keluarga yang masih rendah – edukasi kesehatan terkait pola asuh dan pola makan anak dan keluarga - Kualitas pelayanan di FKTP dan FKTL serta tindak lanjutnya masih perlu dioptimalkan - Keterlibatan semua sektor yang mendukung belum optimal - Untuk keluarga ada yang merasa malu jika anak dikatakan gizi buruk atau stunting - Balita gizi buruk dan stunting pasca rawat inap dari keluarga tidak bisa menindaklanjuti karena keterbatasan dana - Remaja putri dan calon pengantin masih kurang memahami tentang kesehatan dan gizinya
3	Integrasi Layanan Primer (ILP)	Belum semua puskesmas menerapkan ILP	- Belum semua petugas tersosialisasi / terlatih ILP - SDM Kurang - Sarana Prasarana masih kurang - Kurang dukungan dari linsek dan desa - Anggaran terbatas

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Kesehatan Kerja	Belum semua perkantoran menerapkan K3 Perkantoran	- Tempat kerja yang kurang ergonomis - Kurang maksimal penerapan GP2SP (Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif) di perkantoran dan perusahaan - Pengawasan dan pembinaan yang belum maksimal
5	Kesehatan olah raga	Kurangnya aktivitas fisik dan kebugaran jasmani di perkantoran dan sekolah	- Kurangnya sosialisasi sehingga Tidak menerapkan peregangan/aktivitas fisik dan kebugaran jasmani di perkantoran dan sekolah
6	Kesehatan Jiwa	Masih banyaknya pasien pasung dan ODGJ	- Kurang dukungan dari keluarga, desa dan lintas sektor dalam penanganan pasung
7	Kesehatan Tradisional	Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyehatan tradisional	- Kurangnya Legalitas dan regulasi
8	Pemberdayaan Masyarakat	Capaian posyandu integrasi layanan primer masih rendah	- Kurang komitmennya desa, linsek dan camat setempat - Kader belum semua terlatih 25 keterampilan kader - Sarana dan prasarana masih kurang - Media promosi masih kurang
9	Desa Siaga Aktif	Cakupan Desa Siaga Aktif masih rendah	- Kurangnya Komitmen Kepala desa - Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke desa - Anggaran yang kurang
10	Media Promosi	Jenis Media Promosi yang masih kurang	- Sumber daya Manusia yang masih kurang dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Anggaran yang belum mencukupi
11	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Belum semua masyarakat melakukan gerakan hidup sehat	- Kurangnya sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat - Anggaran yang ada terbatas
12	Program Prioritas Makan Bergizi Gratis	Masih rendahnya capaian SLHS untuk SPPG dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis	- Sangat terbatasnya support dana Pelatihan Pangan Olahan Siap Saji untuk SPPG - Terbatasnya dana pengawasan keamanan pangan dan hygiene sanitasi untuk SPPG - E-monev HSP yang sering maintenance sehingga menjadi kendala juga dalam input capaian TPP memenuhi syarat kesehatan
13	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Masih rendahnya capaian indikator 5 Pilar STBM	- Kurangnya advokasi lintas sektor dalam pencapaian 5 Pilar STBM - Masih rendahnya kesadaran dan perubahan perilaku Masyarakat karena masih belum memahami sepenuhnya sanitasi yang baik dan masih mempertahankan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) - Kurangnya Akses Sanitasi yang layak di beberapa desa seperti jamban sehat dan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum memenuhi syarat kesehatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Pendanaan terkait 5 Pilar STBM masih kurang - SISTBM masih terkendala di sistem
14	Surveilans kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKART) dan Surveilans Kualitas Uadara Dalam Ruang (SKUDR) sampai dengan tahun 2030	Belum ada alokasi kalibrasi sanitarian kit dan kegiatan pendampingannya	- Belum ada support dana untuk pendampingannya dan kalibrasi alat sanitarian kit sebagai alat penunjang SKAMRT (Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga) dan SKUDR (Surveilans Kualitas Udara Dalam Ruang)
15	Pengawasan Kualitas Air Minum	Capaian pengawasan eksternal di PDAM belum mencapai standar	- Support dana APBD masih kurang
16	Kabupaten Kota Sehat	Koordinasi linsek untuk mewujudkan Kabupaten Sehat di 9 tatanan masih kurang	- Tingkat kehadiran dalam advokasi dan keberlanjutan program masih rendah dan berganti-ganti personil - Support dana masih minim - Aplikasi Sipantas memiliki keterbatasan dalam hal pembatasan akun dan sinkronisasi data.
17	Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di TFU	Belum Optimalnya Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	- Perlunya adanya peningkatan kapasitas SDM / Orientasi pada pelaku usaha TFU (Akomodasi, Tempat Wisata dan Tempat Olahraga) terkait tata cara penerbitan SLS - TFU (Akomodasi Hotel, Tempat Wisata dan Tempat Olahraga) bagi Petugas Kebersihan harus memiliki sertifikat BNSP/LMS Kemenkes)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Support dana untuk kegiatan TFU masih kurang
18	Pelaksanaan EHRA *(Environmental Health Risk Assessment)*	Belum optimalnya pendanaan untuk kegiatan EHRA	- Kurangnya support anggaran terkait Survei EHRA, tidak adanya bantuan transport untuk enumerator EHRA
19	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Banyak IPAL yang tidak berfungsi	- Kurangnya kapasitas SDM Operator IPAL - Kesejahteraan operator IPAL masih kurang - Operator IPAL dan Petugas LB3 masih merangkap - Perlu pengadaan extra fooding operator IPAL dan LB3
20	*Universal Health Coverage (UHC)*	Tingginya target capaian UHC dan Tingkat Kepesertaan Aktif JKN	- Kemampuan dan kemauan membayar iuran JKN masih sangat rendah. Banyak peserta JKN menunggak meskipun sudah ada skema pembayaran tunggakan secara bertahap dari BPJS Kesehatan karena dianggap kurang menguntungkan bagi peserta. - Banyak masyarakat yang meminta untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sehingga perlu mekanisme seleksi yang ketat dalam pengusulan peserta PBI JK ataupun PBPU Pemda. - Tingginya target capaian UHC dan Tingkat kepesertaan aktif JKN yang ditetapkan Pemerintah Pusat tampaknya tidak mempertimbangkan capaian UHC dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tingkat kepesertaan aktif di tiap daerah
21	Pengawasan Penerbitan SIP Tenaga Medis/Tenaga Medis	Tidak adanya peran verifikasi Dinkes dalam penerbitan SIP	- Hilangnya fungsi verifikator Dinkes dalam proses penerbitan SIP menyulitkan fungsi pengawasan izin praktik nakes/named. - Pengawasan izin praktik bergantung dari keaktifan nakes/named dalam pengisian SISDMK/Satu Sehat, ditambah lagi kendala akibat gagal sinkronisasi antara Satu Sehat/SISDMK/MPP Digital
22	Pemerataan persebaran fasyankes dan fasilitas pelayanan kefarmasian	Minat pendirian fasyankes dan fasilitas pelayanan kefarmasian terkonsentrasi pada wilayah tertentu	Tidak ada regulasi pusat ataupun aplikasi yang mengatur tentang persebaran fasyankes dan fasilitas pelayanan kefarmasian menyebabkan Pemda harus melakukan kajian mandiri terkait kebutuhan fasyankes/fasyanfarm di wilayahnya serta mengembangkan aplikasi mandiri untuk menganalisis persebaran fasyankes/fasyanfarm
23	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Masih belum memadai dalam pengalokasian pembiayaan Kesehatan di tatanan fasyankes	Banyaknya alkes yang ada di faskes yang perlu dikalibrasi tiap tahun sehingga dibutuhkan anggaran kalibrasi alkes untuk pemeliharaan Alkes
24	Prasarana penunjang farmasi	Kapasitas Penyimpanan Gudang Farmasi Kabupaten masih kurang	Gudang Farmasi kabupaten tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan obat, seperti suhu yang terkontrol atau tempat penyimpanan khusus untuk obat yang rusak atau kadaluarsa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
25	Pemeliharaan Bangunan Farmasi	Bangunan Gudang Farmasi Kabupaten masih belum sesuai standar	Kurangnya anggaran pemeliharaan Gedung/bangunan farmasi menyebabkan kondisi bangunan farmasi masih belum bisa mencapai standar
26	Penumpukan obat program kedaluarsa	Terlalu banyaknya obat yang di droping dari provinsi	Kurang koordinasi antara pengelola program kabupaten dengan pengelola program provinsi terkait kebutuhan obat program
27	9 tenaga kesehatan strategis	Masih kurangnya 9 nakes strategis di puskesmas yaitu dokter gigi (9 puskesmas) dan tenaga gizi (1 puskesmas).	Dokter gigi cenderung memilih bekerja di daerah perkotaan sehingga meskipun sudah tersedia formasi dokter gigi, kadang tidak ada yang berminat mendaftar.
28	Tenaga penunjang ASN di puskesmas	Masih kurangnya tenaga penunjang ASN di puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan yang merangkap sebagai tenaga penunjang	Keterbatasan tenaga penunjang dapat menghambat operasional Puskesmas, seperti pengolahan data dan manajemen keuangan
29	Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	a) Fragmentasi Sistem dan Belum Terintegrasi b) Kualitas dan Kelengkapan Data Belum Optimal	a) Penggunaan berbagai aplikasi yang tidak saling terhubung menyebabkan fragmentasi data. Hal ini mengakibatkan petugas harus melakukan input data yang sama ke beberapa aplikasi secara manual, yang meningkatkan beban kerja dan berisiko terjadi ketidaksesuaian data antar system b) Banyak data yang tidak lengkap, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai standar. Beberapa puskesmas masih melakukan input secara retrospektif, bukan real-time. Validasi internal maupun eksternal terhadap data yang dihasilkan juga belum berjalan maksimal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		c) Kendala Infrastruktur	c) Beberapa fasilitas kesehatan, terutama di wilayah pelosok, mengalami keterbatasan akses internet dan minimnya perangkat komputer. Hal ini berdampak pada keterlambatan input data dan terganggunya operasional sistem informasi
		d) Ketergantungan terhadap Vendor	d) Beberapa aplikasi kunci dikembangkan oleh pihak ketiga. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas daerah dalam melakukan pengembangan atau modifikasi sistem sesuai kebutuhan lokal, serta menimbulkan hambatan teknis saat terjadi gangguan
		e) Pemanfaatan Data Belum Maksimal	e) Data yang sudah dihimpun belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, maupun monitoring dan evaluasi. Analisis data masih bersifat administratif dan belum diarahkan untuk mendukung intervensi berbasis bukti
		f) Belum Optimalnya Implementasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	f) Implementasi ASDK sebagai integrator nasional masih menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi data, kesiapan teknis, serta pemahaman SDM di lapangan terhadap sistem tersebut. Akibatnya, konsistensi data pusat-daerah belum tercapai
30	Imunisasi pada usia 0-11 bulan	Belum tercapainya target Imunisasi Dasar Lengkap	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	(Imunisasi Dasar Lengkap/IDL)		- Masih ada orang tua yang menolak imunisasi ganda
31	Imunisasi Pada usia 12-23 bulan (Imunisasi Baduta Lengkap)	Belum tercapainya target Imunisasi Baduta Lengkap	- Masih ada orang tua yang menolak imunisasi karena alasan kepercayaan - Masih ada orang tua yang menolak karena takut efek samping - Terbatasnya alokasi vaksin pada beberapa jenis vaksin - Masih ada anggapan bahwa imunisasi cukup pada anak bayi saja (usia 0-11 bulan) - Belum optimal sosialisasi dan edukasi
32	Imunisasi antigen baru	Belum mencapai target	- Masih ada masyarakat yang belum tahu imunisasi antigen baru - Masih belum optimal sosialisasi dan edukasi terkait imunisasi antigen baru
33	Imunisasi anak sekolah	Belum mencapai target	- Masih ada orang tua/ wali dan murid yang menolak imunisasi karena alasan kepercayaan - Masih ada orang tua yang takut efek samping imunisasi - Sosialisasi dan edukasi kepada murid dan orang tua belum optimal
34	Imunisasi pada WUS (ibu hamil)	Capaian imunisasi status Td+2 Ibu hamil masih belum mencapai target	- Masih belum optimal skrining imunisasi Td pada ibu hamil - Sosialisasi dan edukasi belum optimal
35	Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Masih ada selisih cakupan antara cakupan imunisasi berdasarkan laporan PWS dan berdasarkan ASIK	- Belum semua petugas melakukan input ASIK secara real time - Masih ada kendala teknis dalam penginputan ASIK seperti delay data dll - Masih ada beberapa bidan desa yang tidak melaporkan SKDR setiap minggu

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Belum semua kasus penyakit yang ada di Fasyankes dan jejaringnya dilaporkan di WEB SKDR - Perlunya Sosialisasi yang intensif dan on the job training kepada petugas Surveilans RS
36	Pelaporan di Aplikasi WEB SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	- Belum semua bidan desa melaporkan mingguan SKDR ke petugas Surveilans Puskesmas - Masih ada puskesmas yang belum mencapai target 50 % minimal alert yang muncul pada WEB SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) - Belum semua RS (terutama RS Swasta) masuk menjadi unit pelapor	- Masih ada beberapa puskesmas yang tidak pernah melaporkan kasus AFP selama beberapa tahun terakhir - Masih ada beberapa puskesmas yang tidak pernah melaporkan suspek campak selama beberapa tahun terakhir
37	Penemuan kasus AFP	Belum semua puskesmas mencapai target pelaporan kasus AFP setiap tahun	
38	Penemuan kasus campak	Belum semua puskesmas mencapai target pelaporan suspek campak setiap tahun	
39	Pelayanan kesehatan Penyakit Tidak Menular (DM dan Hipertensi)	Capaian yang belum mencapai target SPM	- Kesadaran masyarakat untuk berobat secara teratur di faskes masih rendah - Jejaring puskesmas dengan faskes di wilayah kerjanya belum berjalan secara optimal
40	Pelayanan kesehatan pada	Capaian yang belum mencapai target SPM	- Kesadaran masyarakat untuk melakukan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	penduduk usia produktif (15-59 th) dengan kegiatan utama deteksi dini atau skrining penyakit tidak menular		skrining secara teratur masih rendah, karena merasa dirinya sehat - Dukungan lintas sektor yang masih kurang

B. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rumusan isu strategis menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala global, nasional, dan regional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka menengah. Rumusan isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Perumusan isu strategis dilakukan melalui telaah dokumen yang bersumber dari berbagai laporan, dokumen perencanaan pembangunan nasional (Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2029-2045 dan RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045).

Memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, serta lingkungan strategis global, nasional, dan regional (Provinsi Jawa Tengah), serta isu jangka panjang daerah (Kabupaten Brebes) Tahun 2025-2045, maka Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan angka kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha
4. Tata kelola pemerintahan
5. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa
6. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Merujuk pada isu strategis Nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah, dan Isu strategis Pemerintah Kabupaten Brebes yang ada dalam RPJPD Kabupaten 2025 dan RPJMD 2025 – 2029. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah

maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan, sosial budaya dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang, yaitu:

Umur Harapan Hidup Kabupaten Brebes masih dibawah rata-rata UHH Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut antara lain dikarenakan:

a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), hal ini disebabkan belum semua Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC (Antenatal Care) sesuai dengan standar, masih kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten terhadap penanganan Ibu hamil Risiko tinggi, belum semua Ibu hamil mendapatkan pendampingan, dan belum maksimalnya sistem informasi rujukan persalinan.
b. Masih tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), hal ini disebabkan karena :
    1) Belum semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar,
    2) Masih kurangnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfiksia),
    3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan;
c. Meningkatnya angka kesakitan Penyakit Tidak Menular antara lain jantung, diabetes, kanker, dan stroke hal ini disebabkan karena :
    1) Belum sadarnya masyarakat terhadap pola hidup sehat seperti makan buah dan sayur, aktivitas fisik, tidak merokok dan cek kesehatan rutin
    2) Belum semua desa terdapat posbindu sebagai salah satu sarana skrining Penyakit Tidak Menular
    3) Belum semua Fasilitas kesehatan mampu melakukan skrining Penyakit Tidak Menular antara lain kanker servik (IVA) dan pengobatan krioterapi

d. Masih tingginya penularan penyakit, yaitu HIV/AIDs, TB, kusta, filariasis, pneumonia pada balita, DBD/chikungunya, diare, dan penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi) hal ini disebabkan antara lain :
    1) Belum semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap
    2) Belum semua orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
    3) Belum semua orang terduga TBC dilakukan pemeriksaan dahak.
    4) Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain masih banyaknya perilaku buang air besar sembarangan atau masih ada masyarakat yang tidak mempunyai akses jamban sehat.
e. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini disebabkan antara lain :
    1) Belum semua Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar.
    2) rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI,
    3) masih kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif,
    4) belum semua anak BALITA mendapatkan pelayanan sesuai standar antara lain : penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun , pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
f. Masih adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang di pasung.
g. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan (dasar dan rujukan), kurangnya tenaga kesehatan khususnya kebutuhan dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum terpenuhi secara merata. Serta belum semua fasilitas kesehatan terakreditasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan adalah membantu Bupati Brebes melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam kaitannya dengan implementasi rencana pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2025-2029 tidak lagi mencantumkan visi dan misi tersendiri, namun sesuai tusinya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Brebes. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Brebes tahun 2025–2029 adalah:

"BREBES BERES"

Mewujudkan Brebes Sebagai kabupaten yang:

Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat, dan Sejahtera

Rumusan visi tersebut terdiri dari 5 unsur frasa kalimat sebagai berikut:

a. Berkeadaban
b. Ekonomi Tangguh
c. Responsif
d. Edukatif
e. Sehat dan Sejahtera

Tabel 3.1.
Rumusan Visi Kepala Daerah Kabupaten Brebes

Unsur Visi	Penjelasan
Berkeadaban	Merupakan upaya dalam mengembangkan nilai-nilai budaya, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, serta pembangunan daerah agar tercipta harmoni, keteraturan sosial, dan sikap saling menghormati. Harapannya Kabupaten

Unsur Visi	Penjelasan
	Brebes akan menjadi daerah yang menjunjung tinggi keadilan, keberagaman, serta nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakatnya.
Ekonomi Tangguh	Diartikan sebagai perekonomian daerah yang kuat dengan meningkatkan daya saing industri lokal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membuka peluang investasi yang berkelanjutan. Kabupaten Brebes akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan kuat.
Responsif	Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang tanggap, transparan, dan cepat dalam menangani permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Melalui digitalisasi layanan publik, optimalisasi peran aparatur negara, serta partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Brebes akan membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Edukatif	Merupakan perubahan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat menjadi lebih baik dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, berkualitas, serta berbasis teknologi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, Kabupaten Brebes akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, kreatif, serta siap menghadapi tantangan global.
Sehat dan Sejahtera	Meningkatnya taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, serta jaminan sosial. Hal ini juga

Unsur Visi	Penjelasan
	merupakan realisasi dari 9 indikator tatanan sehat yang terdiri dari tatanan permukiman, sarana dan prasarana sehat; sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat; industri dan perkantoran sehat; pariwisata sehat; pertambangan sehat; hutan sehat; kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; ketahanan pangan dan gizi; serta mitigasi dan penanggulangan bencana. Kabupaten Brebes berkomitmen menciptakan lapangan kerja yang layak, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, sehingga seluruh warga dapat hidup dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi berfungsi sebagai pedoman sekaligus batasan dalam proses pembangunan agar setiap kebijakan dan program yang disusun tetap selaras dengan arah pembangunan daerah. Berbagai strategi dan kebijakan yang dirancang akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada pencapaian visi Kabupaten Brebes.

Adapun rumusan misi yang mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Misi dari Kabupaten Brebes ada 7 (Tujuh) yaitu:

1. Masyarakat Brebes yang berketuhanan, taat hukum, toleran, dan berakhlakul karimah. Kabupaten Brebes berkomitmen untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, memiliki moralitas yang baik, serta menaati hukum yang berlaku. Dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama, keberagaman sosial, dan sikap saling menghormati, masyarakat Kabupaten Brebes dapat hidup dalam harmoni serta menjalankan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan.

2. Mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan, berkelanjutan, dan pro-investasi, dengan pembangunan untuk seluruh masyarakat. Kabupaten Brebes berkomitmen untuk menjalankan pembangunan yang transparan dan bebas dari korupsi, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pembangunan yang berorientasi pada kemajuan teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan akan menjadi prioritas utama agar Brebes berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta memperkuat ekonomi kreatif. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan ini yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia guna mendorong produktivitas dan mengurangi angka pengangguran. Sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Brebes menuju pembangunan perekonomian yang berkelanjutan
4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus Pembangunan di Kabupaten Brebes akan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program perlindungan sosial, kebijakan yang berperspektif gender, serta fasilitas publik yang ramah bagi semua kelompok akan terus ditingkatkan agar setiap warga dapat hidup dengan aman, nyaman, dan mendapatkan hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Menjamin pendidikan yang merata, terjangkau, berkualitas dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam kemajuan perekonomian di suatu daerah. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan vokasi akan diperkuat guna menciptakan tenaga kerja yang terampil, kreatif, serta siap menghadapi tantangan global. Selain itu, pembangunan karakter juga menjadi fokus

agar masyarakat Kabupaten Brebes memiliki daya juang tinggi, mandiri, dan produktif.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam membangun Kabupaten Brebes yang lebih maju. Salah satu pilar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan peningkatan kesadaran dan fasilitas serta infrastruktur dasar pada bidang kesehatan. Peningkatan kesehatan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat di Kabupaten Brebes menjadi masyarakat yang sehat, tangguh, dan berdaya guna.
7. Memajukan potensi yang dimiliki oleh Brebes dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif sebagai penggerak sektor lainnya yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Kabupaten Brebes memiliki berbagai potensi unggulan, baik dalam sektor pertanian, perikanan, industri, maupun pariwisata. Dengan pengelolaan yang optimal dan inovatif, potensi ini dapat dikembangkan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah juga akan mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan akademisi guna memperkuat daya saing daerah dalam skala nasional maupun global. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam menguatkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes.

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dalam hal ini mendukung dalam mewujudkan visi misi ke-6.

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Daerah, permasalahan dan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan Daerah, dan dalam rangka berkontribusi mendukung pencapaian visi misi daerah terutama dalam mewujudkan pembangunan yang bersih, berkeadilan, berkemajuan dan berkelanjutan, ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah untuk lima tahun ke depan. Tujuan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 adalah: **"Mewujudkan Akses dan Layanan Kesehatan yang Semakin Berkualitas"** dengan indikator Umur Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.

3.2. Sasaran

Adapun Sasaran yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025 s.d 2029 untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Daerah dalam lima tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan di Kabupaten Brebes;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, merupakan kondisi yang perlu diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2025-2030

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan									
Mewujudkan Akses dan Layanan Kesehatan yang Semakin Berkualitas	1.Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,18	74,37	74,55	74,74	74,92	75,11	75,30
	2.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	23,1	21	20,75	20	19,25	18,5	17,5

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran									
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	54	51	48	45	42	39	36
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,73	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,46
	3. Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	15,9	15,79	14,78	14,12	13,61	13,11	12,61
	4. Cakupan pelayanan kesehatan esensial	%	71,86	72	72,5	73	73,5	74	75
	5. Desa Siaga Aktif Mandiri	%	37,71	40	44	48	52	56	60
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	6. Nilai SAKIP OPD	Angka	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	Indeks	88,16	88,2	88,25	88,3	88,35	88,4	88,45

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan tercapai. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes selama lima tahun kedepan, ditetapkan strategi dan arah kebijakan selaras dengan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah. Dengan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan akan menentukan kinerja Dinas Kesehatan Daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Brebes dalam periode 2025-2029 adalah:

Sasaran 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan serta kefarmasian, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Pemenuhan sarana prasarana serta vitamin/obat kesehatan sesuai standar, Mendorong upaya pencegahan penyakit, Peningkatan status gizi masyarakat, institusi dan penyelenggaraan makanan, Penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan mendorong faskes inklusi dan ramah disabilitas;
2. Mendorong gaya hidup sehat melalui promosi pola makan sehat, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat dan edukasi penyakit tidak menular;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui peningkatan akses terhadap informasi kesehatan, dan memanfaatkan aplikasi kesehatan;
4. Perhatian khusus terhadap lansia melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan lansia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan lansia, membangun lingkungan yang mendukung lansia.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah, melalui 1)Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan kapasitas SDM, 2)Peningkatan mutu pelayanan publik, dan 3)Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sarana perangkat daerah.

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026-2030

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Strategi 1 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan				
1. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan serta kefarmasian				
Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP)	Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP)	Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP)	Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP)	Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP)
Melaksanakan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Melaksanakan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Melaksanakan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Melaksanakan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Melaksanakan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian
Memperkuat kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Memperkuat kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Memperkuat kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Memperkuat kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Memperkuat kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian
Meningkatkan jumlah SDM untuk pengawasan Pangan IRTP	Penambahan sarana transportasi untuk kegiatan perjalanan dinas pengawasan obat dan makanan	Meningkatkan jumlah penilaian pre market dan Post market Produk Industri Rumah Tangga Pangan dan tepat waktu sesuai standar.	Meningkatnya jumlah sarana kefarmasian, alat Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	Meningkatkan peran lintas sektor dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi
2. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan				
Pembuatan peta ketesediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan SDM	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan
Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota
3. Pemenuhan sarana, prasarana, serta vitamin/obat kesehatan sesuai standar				
Pembuatan peta ketersediaan	Implementasi hasil pemetaan	Implementasi hasil pemetaan	Implementasi hasil pemetaan	Implementasi hasil pemetaan
Pengelolaan, penyimpanan dan SOP	Pengelolaan, penyimpanan dan SOP	Pengelolaan, penyimpanan dan SOP	Pengelolaan, penyimpanan dan SOP	Pengelolaan, penyimpanan dan SOP
Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten
Pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan	Pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan	Pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan	Pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan	Pengelolaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan
4. Mendorong upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular, napza, dan kesehatan jiwa				
Optimalisasi Cakupan Imunisasi baik imunisasi Mencapai Herd Imunity	Optimalisasi Cakupan Imunisasi Untuk Mencapai Herd Imunity	Optimalisasi Cakupan Imunisasi Untuk Mencapai Herd Imunity	Optimalisasi Cakupan Imunisasi Untuk Mencapai Herd Imunity	Optimalisasi Cakupan Imunisasi Untuk Mencapai Herd Imunity
Melaksanakan Surveilan dan pelayanan imunisasi aktif dan pasif di puskesmas dan jejaringnya	Melaksanakan Surveilan dan pelayanan imunisasi aktif dan pasif di Puskesmas dan jejaringnya	Melaksanakan Surveilan dan pelayanan imunisasi aktif dan pasif Puskesmas dan jejaringnya	Melaksanakan Surveilan dan pelayanan imunisasi aktif dan pasif Puskesmas dan jejaringnya	Melaksanakan Surveilan dan pelayanan imunisasi aktif dan pasif Puskesmas dan jejaringnya

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat	Penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat	Penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat	Penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat	Penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat
Sensus dan pemetaan daerah endemi tinggi TBC dan Kusta.	ACF secara masif di populasi kunci (penghuni lapas, perusahaan, pesantren, daerah kumuh) dan kontak erat pasien untuk skrining TBC/Kusta	Intensifikasi pelayanan penemuan dan pengobatan langsung bagi penderita baru TBC/Kusta.	Kegiatan pemantauan dan kunjungan rumah berkala bagi pasien TBC/Kusta mangkir dengan melibatkan kader	Inisiasi pembentukan dan pemberdayaan kelompok dukungan sebaya (KDS) TBC/Kusta
Assesmen kapasitas semua Faskes (Puskesmas, Klinik, RS) untuk layanan TBC dan Kusta.	Assesmen kapasitas semua Faskes (Puskesmas, Klinik, RS) untuk layanan TBC dan Kusta.	Assesmen kapasitas semua Faskes (Puskesmas, Klinik, RS) untuk layanan TBC dan Kusta.	Assesmen kapasitas semua Faskes (Puskesmas, Klinik, RS) untuk layanan TBC dan Kusta.	Assesmen kapasitas semua Faskes (Puskesmas, Klinik, RS) untuk layanan TBC dan Kusta.
5. Peningkatan status gizi masyarakat, institusi dan penyelenggaraan makanan				
Peningkatan mutu surveilans	Peningkatan mutu surveilans	Peningkatan mutu surveilans	Peningkatan mutu surveilans	Peningkatan mutu surveilans
Peningkatan mutu pelayanan gizi	Peningkatan mutu pelayanan gizi	Peningkatan mutu pelayanan gizi	Peningkatan mutu pelayanan gizi	Peningkatan mutu pelayanan gizi
Penguatan laporan status gizi	Penguatan laporan status gizi	Penguatan laporan status gizi	Penguatan laporan status gizi	Penguatan laporan status gizi
Advokasi dan intervensi gizi spesifik	Advokasi dan intervensi gizi spesifik	Advokasi dan intervensi gizi spesifik	Advokasi dan intervensi gizi spesifik	Advokasi dan intervensi gizi spesifik
Monitoring dan evaluasi program	Monitoring dan evaluasi program	Monitoring dan evaluasi program	Monitoring dan evaluasi program	Monitoring dan evaluasi program

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
6. Penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				
Advokasi pemenuhan anggaran serta regulasi untuk pencapaian UHC	Advokasi pemenuhan anggaran serta regulasi untuk pencapaian UHC	Advokasi pemenuhan anggaran serta regulasi untuk pencapaian UHC	Advokasi pemenuhan anggaran serta regulasi untuk pencapaian UHC	Advokasi pemenuhan anggaran serta regulasi untuk pencapaian UHC
Advokasi peran swasta dalam program JKN	Advokasi peran swasta dalam program JKN	Advokasi peran swasta dalam program JKN	Advokasi peran swasta dalam program JKN	Advokasi peran swasta dalam program JKN
Penguatan upaya pencegahan fraud JKN	Penguatan upaya pencegahan fraud JKN	Penguatan upaya pencegahan fraud JKN	Penguatan upaya pencegahan fraud JKN	Penguatan upaya pencegahan fraud JKN
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi
7. Mendorong faskes inklusi dan ramah disabilitas				
Edukasi faskes inklusi dan ramah disabilitas	Edukasi faskes inklusi dan ramah disabilitas	Edukasi faskes inklusi dan ramah disabilitas	Edukasi faskes inklusi dan ramah disabilitas	Edukasi faskes inklusi dan ramah disabilitas
Penyediaan sarana pelayanan yang inklusi dan ramah disabilitas	Penyediaan sarana pelayanan yang inklusi dan ramah disabilitas	Penyediaan sarana pelayanan yang inklusi dan ramah disabilitas	Penyediaan sarana pelayanan yang inklusi dan ramah disabilitas	Penyediaan sarana pelayanan yang inklusi dan ramah disabilitas
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi
Strategi 2 : Mendorong gaya hidup sehat				
1. Promosi pola makan sehat, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat				
Penguatan Regulasi Upaya Promotif dan Preventif melalui GERMAS	Penguatan Regulasi Upaya Promotif dan Preventif melalui GERMAS	Penguatan Regulasi Upaya Promotif dan Preventif melalui GERMAS	Penguatan Regulasi Upaya Promotif dan Preventif melalui GERMAS	Penguatan Regulasi Upaya Promotif dan Preventif melalui GERMAS
Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media	Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media	Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media	Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media	Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media
2. Edukasi penyakit menular dan tidak menular				
Promosi kesehatan tentang pencegahan dan	Promosi kesehatan tentang pencegahan dan	Promosi kesehatan tentang pencegahan dan	Promosi kesehatan tentang pencegahan dan	Promosi kesehatan tentang pencegahan dan

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
pengendalian penyakit menular dan tidak menular	pengendalian penyakit menular dan tidak menular	pengendalian penyakit menular dan tidak menular	pengendalian penyakit menular dan tidak menular	pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Strategi 3 : Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi				
1. Peningkatan akses terhadap informasi kesehatan				
Penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)	Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)	Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)	Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)	Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)
2. Memanfaatkan aplikasi kesehatan				
Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning
Pembuatan database kesehatan daerah	Pembuatan database kesehatan daerah	Pembuatan database kesehatan daerah	Pembuatan database kesehatan daerah	Pembuatan database kesehatan daerah
Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan AI, Data Science dan Machine Learning
Memanfaatkan aplikasi/web untuk mendukung kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit	Memanfaatkan aplikasi/web untuk mendukung kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit	Memanfaatkan aplikasi/web untuk mendukung kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit	Memanfaatkan aplikasi/web untuk mendukung kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit	Memanfaatkan aplikasi/web untuk mendukung kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Strategi 4 : Perhatian khusus terhadap lansia				
1. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan lansia				
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada lanjut usia	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada lanjut usia	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada lanjut usia	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada lanjut usia	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada lanjut usia
Monitoring dan evaluasi program lanjut usia	Monitoring dan evaluasi program lanjut usia	Monitoring dan evaluasi program lanjut usia	Monitoring dan evaluasi program lanjut usia	Monitoring dan evaluasi program lanjut usia
Penguatan pelaporan	Penguatan pelaporan	Penguatan pelaporan	Penguatan pelaporan	Penguatan pelaporan
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan lansia				
Pembuatan peta ketesediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan SDM	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan	Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan peta ketersediaan tenaga dan pelatihan
Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review	Peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan dan pertemuan review
3. Membangun lingkungan yang mendukung lansia				
Peningkatan mutu pelayanan program Care giver lanjut usia	Peningkatan mutu pelayanan program Care giver lanjut usia	Peningkatan mutu pelayanan program Care giver lanjut usia jangka panjang	Peningkatan mutu pelayanan program Care giver lanjut usia jangka panjang	Peningkatan mutu pelayanan program Care giver lanjut usia jangka panjang

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Strategi 5 : Meningkatkan Kualitas pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah				
1. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan kapasitas SDM				
Penilaian dan Pemetaan Kebutuhan SDM : - Identifikasi Kebutuhan SDM (Penyusunan ABK) - Layanan Digital Kepegawaian	- Identifikasi Kebutuhan SDM (Penyusunan ABK) - Pengembangan kompetensi - Layanan Digital Kepegawaian	- Identifikasi Kebutuhan SDM (Penyusunan ABK) - Pengembangan kompetensi - Layanan Digital Kepegawaian	- Penyusunan ABK - Pengembangan kompetensi - Manajemen Talenta - Layanan Digital Kepegawaian	- Penyusunan ABK - Pengembangan kompetensi - Manajemen Talenta - Layanan Digital Kepegawaian
Penerapkan sistem penilaian kinerja berbasis hasil : - Implementasi Sistem Penilaian Kinerja - Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja	- Implementasi Sistem Penilaian Kinerja - Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja	- Implementasi Sistem Penilaian Kinerja - Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja	- Implementasi Sistem Penilaian Kinerja - Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja	- Implementasi Sistem Penilaian Kinerja - Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja
Pelaksanaan workshop / seminar tentang etika kerja dan budaya organisasi : - Budaya Kerja Adaptif dan Kolaboratif	Pelaksanaan workshop / seminar tentang etika kerja dan budaya organisasi : - Budaya Kerja Adaptif dan Kolaboratif	Pelaksanaan workshop / seminar tentang etika kerja dan budaya organisasi : - Budaya Kerja Adaptif dan Kolaboratif	Pelaksanaan workshop / seminar tentang etika kerja dan budaya organisasi : - Budaya Kerja Adaptif dan Kolaboratif	Pelaksanaan workshop / seminar tentang etika kerja dan budaya organisasi : - Budaya Kerja Adaptif dan Kolaboratif
2. Peningkatan mutu pelayanan publik				
Memperkuat kompetensi petugas pelayanan publik	Memperkuat kompetensi petugas pelayanan publik	Memperkuat kompetensi petugas pelayanan publik	Memperkuat kompetensi petugas pelayanan publik	Memperkuat kompetensi petugas pelayanan publik

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Penyediaan sarana pelayanan publik yang memadai	Penyediaan sarana pelayanan publik yang memadai	Penyediaan sarana pelayanan publik yang memadai	Penyediaan sarana pelayanan publik yang memadai	Penyediaan sarana pelayanan publik yang memadai
Penguatan pelayanan pengaduan	Penguatan pelayanan pengaduan	Penguatan pelayanan pengaduan	Penguatan pelayanan pengaduan	Penguatan pelayanan pengaduan
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sarana perangkat daerah				
Penilaian Ketersediaan dan Kualitas Sarpras	Penyusunan rencana kebutuhan Sarpras	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
Penguatan Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana	Penguatan Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana	Penguatan Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana	Penguatan Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana	Penguatan Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

4.1. Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan selaras dengan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya, maka ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

   Program ini dilaksanakan dengan kinerja yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

   Program ini dilaksanakan dengan kinerja yang akan dicapai yaitu meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini meliputi kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman**

Program ini dilaksanakan dengan kinerja yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini meliputi kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini dilaksanakan dengan kinerja yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini meliputi Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan program pendukung layanan perangkat daerah, yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah secara keseluruhan. Kinerja yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah, sehingga seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Daerah dapat berjalan dengan baik dandapat tercapai target kinerja organisasi Dinas Kesehatan Daerah dalam lima tahun ke depan.

Penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai target dan pagunya dalam lima tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	Mewujudkan akses dan layanan kesehatan yang semakin berkualitas					
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah				
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan PD		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah**
				Meningkat nya kualitas dokumen perencana an, dan evaluasi perangkat daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6)**
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K4)

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
						Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan (indikator SDGs)
						Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (indikator SDGs)
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
						Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (Indikator SDGs)
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar
						Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
						Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (RIBK)
						Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)
						Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
						Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
						Presentase Orang Penderita Penyakit menular dan tidak menular Mendapatkan Pelayanan Sesuai standar
						Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate/TSR) (RIBK)
						Cakupan penemuan kasus TB (Treatment Coverage) (RIBK)
						Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (indikator SDGs)
						Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Presentase orang dengan Pelayanan Kesehatan Orang dengan suspect Malaria sesuai standar
						Cakupan imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 Bulan (IDL) (RIBK)
						Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan (indikator SDGs)
						Persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheri tetanus (3 dosis DPT) (Indikator Pelayanan Esensial)
						cakupan puskesmas yang melayani kesehatan pasca bencana, Wabah dan KLB
						Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (RIBK)
						Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (RIBK)
						Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat (RIBK)
						Puskesmas yang menyelenggarakan KKS
						Persentase puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
						Persentase puskesmas yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara
						Persentase puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) Memenuhi Syarat

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Persentase puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat
						Persentase puskesmas yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan
						Fasyankes (RS dan puskesmas) memenuhi layanan kesling kunci
						Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)
						Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (RIBK)
						Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) (SDG's)
						Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (RIBK)
						Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (RIBK)
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (RIBK)
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (RIBK)
						Persentase posyandu aktif siklus hidup (RIBK)
						Persentase lanjut usia yang mandiri (RIBK)
						Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
				terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat pelayanan kesehatan standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayan kesehatan Standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar usia
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
					Pengelolaan Kawasan tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis	Jumlah orang dengan tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan suspect Malaria yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana sesuai standar
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Lingkungan
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
					Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
				Tersedianya data dan informasi kesehatan	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (RIBK)**
						Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (RIBK)
						Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (RIBK)
				Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	
					Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan praktik tenaga kesehatan
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
				Layanan Kesehatan UKP dan UKM	**dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, dan MAKANAN MINUMAN**	**Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (RIBK)**
						Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (RIBK)
						Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (RIBK)
						Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (RIBK)
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (RIBK)

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
(LABKESDA)			**Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah**
				Meningkat nya layanan administr asi keuangan perangkat daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
				daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Tersedianya Pelayanan Laboratorium untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah di Kabupaten Brebes**
				terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
				terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan UKM dan UKP di Laboratorium Kesehatan Daerah	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
				Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di UPTD Labkes Kab. Brebes	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**	**Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di Laboratorium Kesehatan Daerah**
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Terlaksananya PHBS dalam rangka promotif preventif di UPTD Labkesda**
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
(KP2K)			**Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Balai Pengobatan Paru dan Kusta**

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
			UPTD Balai Pengobatan Paru dan Kusta			
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan UKM dan UKP di Laboratorium Kesehatan Daerah	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah AlatKesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA
				Tersedianya data dan informasi kesehatan	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
				terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**	**PresentaseTenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA**
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan tentang Pengobatan Paru dan Kusta**
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Balai PENGOBATAN PARU DAN KUSTA

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
(RSUD)			**Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan RSUD KAB. BREBES**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Brebes**
						Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan
						Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Bumiayu
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Kab. Brebes	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Brebes	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Ir.Soekarno	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Bumiayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
(UOBF Puskesmas)			**Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan Puskesmas Kab. Brebes**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Brebes**
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tanjung
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Banjarharjo
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bumiayu

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Paguyangan
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bandungsari
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bantarkawung
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bentar
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bojongsari
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Buaran
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bulakamba
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikakak
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikeusal Kidul
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jagalempeni
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatibarang
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatirokeh
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaligangsa
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kalimati
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaliwadas
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kecipir
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kemurang Wetan
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kersana

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Ketanggungan
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Klikiran
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kluwut
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kutamendala
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Larangan
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Losari
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Luwunggede
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Pemaron
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Salem
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sidamulya
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sirampog
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sitanggal
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Siwuluh
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tonjong
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Wanasari
						Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Winduaji
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Brebes	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Banjarharjo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bumiayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Paguyangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandungsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bantarkawung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bentar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bojongsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Buaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulakamba	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cikakak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cikeusal Kidul	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jagalempeni	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatibarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatirokeh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kaligangsa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kalimati	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kaliwadas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kecipir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kemurang Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kersana	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ketanggungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Klikiran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kluwut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamendala	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Larangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Losari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Luwunggede	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pemaron	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Salem	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sidamulya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sirampog	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sitanggal	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Siwuluh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tonjong	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wanasari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

NSPK / SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	KINERJA/OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Winduaji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2030

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BIDANG KESEHATAN														**722.355.284.642**	**744.623.052.220**	**800.787.937.315**	**828.714.438.597**	**868.973.739.951**	**903.296.391.730**
DINAS KESEHATAN DAERAH																			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan PD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100						
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	87.260.000	104.999.800	105.000.000	106.000.000	107.000.000	108.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	7.114.700	9.499.800	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5.649.900	9.999.900	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	4.137.471	3.999.900	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	3.999.900	3.150.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	56.376.800	68.895.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	83.000.000
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	12.040.000	15.000.000	27.000.000	35.000.000	43.000.000	55.000.000
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	1	1	1	1	1	12.040.000	15.000.000	27.000.000	35.000.000	43.000.000	55.000.000
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.445	2.590	2.823	3.056	3.289	3.522	3.755	217.977.277.056	220.049.738.150	222.250.235.532	224.472.737.887	226.717.456.266	228.984.639.918
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	67.357.200	156.290.700	157.000.000	158.000.000	159.000.000	160.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	25.096.500	368.782.400	369.000.000	370.000.000	371.000.000	372.000.000
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	1	1	1	1	1	0	238.750.000	255.000.000	267.000.000	280.000.000	300.000.000
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	18.557.384	118.754.300	125.000.000	131.000.000	138.000.000	145.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	1	1	1	1	1	37.980.000	145.910.000	170.000.000	178.000.000	187.000.000	197.000.000
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	51.764.500	49.988.600	50.000.000	53.000.000	56.000.000	60.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakaN	Paket	1	1	1	1	1	1	1	126.677.600	143.929.400	110.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	27.244.300	34.959.000	35.000.000	37.000.000	40.000.000	43.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	130.160.000	139.917.000	145.000.000	152.000.000	160.000.000	170.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	24.696.000	41.716.000	48.000.000	50.000.000	53.000.000	56.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	33.600.000	33.600.000	35.000.000	36.500.000	39.000.000	42.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	543.074.750	1.086.149.750	1.087.000.000	1.088.000.000	1.089.000.000	1.090.000.000
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	1	1	1	1	1	0	371.158.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	1	1	1	1	0	400.000.000	430.000.000	450.000.000	470.000.000	500.000.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	15	15	15	15	15	15	25.800.000	121.386.800	123.000.000	125.000.000	128.000.000	130.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	7	7	7	7	7	0	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	1	1	1	1	0	200.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	406.750.000	293.456.000	400.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	0	50.000.000	70.000.000	90.000.000	100.000.000
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	744.930.000	802.996.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	0	20.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	3.559.563.500	3.617.049.000	3.650.000.000	3.660.000.000	3.670.000.000	3.680.000.000
		Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	0	250.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	1	1	1	297.886.000	249.793.500	270.000.000	270.000.000	290.000.000	300.000.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	5.600.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	7	7	7	7	7	220.658.000	149.932.200	155.000.000	160.000.000	160.000.000	165.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	486.895.051	497.668.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	0	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	0	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6)	%	85,8	100	100	100	100	100	100						
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K4)	%	91,1	100	100	100	100	100	100						
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87,24	100	100	100	100	100	100						
					Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan(indikator SDGs)	%	100	100	100	100	100	100	100						
					Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (indikator SDGs)	%	94,63	100	100	100	100	100	100						
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	87,63	100	100	100	100	100	100						
					Jumlah Kematian Bayi	Kasus	303	298	293	288	283	278	273						
					Jumlah Kematian Balita	Kasus	372	364	357	349	342	334	327						
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88,81	100	100	100	100	100	100						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Indikator SDGs)	%	8	7,8	7,6	7,4	7,2	7	6,8						
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,4	100	100	100	100	100	100						
					Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,23	100	100	100	100	100	100						
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	83,43	100	100	100	100	100	100						
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,93	100	100	100	100	100	100						
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	57,62	100	100	100	100	100	100						
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	77,75	100	100	100	100	100	100						
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	5,57	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00						
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (RIBK)	%	NA	1	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5						
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	%	NA	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	20,5						
					Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	%	57,14	58	59	60	61	62	63						
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	61,15	100	100	100	100	100	100						
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	93,06	100	100	100	100	100	100						
					Presentase Orang Penderita Penyakit menular dan tidak menular Mendapatkan Pelayanan Sesuai standar	%	97,26	100	100	100	100	100	100						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(Treatment Success Rate/TSR)* (RIBK)	%	79	82	83	84	85	87	88						
					Cakupan penemuan kasus TB *(Treatment Coverage/TC)* (RIBK)	%	86	90	91	92	93	94	95						
					Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar	%	59,25	60	62	65	70	72	75						
					Presentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan suspect Malaria sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100						
					Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,2	1,19						
					Cakupan Penemuan kasus pneumonia pada Balita	%	67,29	70	72	74	76	78	80						
					Cakupan imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 Bulan (IDL) (RIBK)	%	95,9	97	97	98	98,5	99	99						
					Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan (indikator SDGs)	%	95,2	95,5	96	96,5	97	97,5	98						
					Persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheri tetanus (3 dosis DPT) (Indikator Pelayanan Esensial)	%	87,8	88	88,5	89	89,5	90	90,5						
					Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	100	83	85	88	92	95	96						
					cakupan puskesmas yang melayani kesehatan pasca bencana, Wabah dan KLB	%	100	100	100	100	100	100	100						
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (RIBK)	%	NA	5	7	10	15	17	20						
					Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (RIBK)	%	13,47	20,20	33,00	45,79	58,59	71,38	84,18						
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat (RIBK)	%	NA	30	35	40	45	50	60						
					Puskesmas yang menyelenggarakan KKS	unit	38	38	38	38	38	38	38						
					Persentase puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	NA	5,26	7,89	10,52	13,16	18,42	23,68						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Persentase puskesmas yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara	%	NA	2,63	5,26	7,89	10,52	13,15	18,42						
					Persentase puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) Memenuhi Syarat	%	30	39,47	44,73	50	52,63	57,89	63,16						
					Persentase puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	NA	2,63	5,26	7,89	10,52	13,15	18,42						
					Persentase puskesmas yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan	%	NA	5,26	7,89	10,52	13,15	15,78	21,05						
					Fasyankes (RS dan puskesmas) memenuhi layanan kesling kunci	unit	54	54	54	54	54	54	54						
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	%	23,8	20	19	18	17	16	15						
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (RIBK)	%	NA	30	40	50	60	70	80						
					Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) (SDG's)	%	98,31	97,6	97,7	97,8	97,9	98	98,1						
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (RIBK)	%	75,16	71,61	71,71	71,81	71,91	72,01	72,11						
					Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	NA	83	85	88	92	95	96						
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (RIBK)	%	50	60	70	80	90	95	100						
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	35,35	38,38	40,40	40,40	47,47	47,47	54,55						
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (RIBK)	%	74,19	74,19	74,24	75	75,76	75,76	75,76						
					Persentase posyandu aktif siklus hidup (RIBK)	%	15,99	30,05	44,10	58,16	72,21	86,27	100						
					Persentase lanjut usia yang mandiri (RIBK)	%	NA	75	77	79	81	83	85						
		terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	25.502	25.129	24.575	24.383	24.010	23.637	23.264	136.995.804	194.227.800	200.000.000	250.000.000	270.000.000	300.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	23.759	23.500	23.250	23.000	22.750	22.500	22.300	19.661.952	113.467.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	23.348	22.752	22.000	21.800	21.600	21.400	21.200	81.693.456	574.544.900	632.000.000	695.200.000	765.000.000	850.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat pelayanan kesehatan standar	Orang	93.373	101.219	102.219	103.219	104.219	105.219	106.219	298.242.340	290.992.600	569.182.600	602.554.600	431.042.600	435.874.600
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayan kesehatan Standar	Orang	79.102	83.057	87.209	91.569	96.147	100.954	106.001	141.647.000	59.948.000	120.000.000	140.000.000	160.000.000	180.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	197.414	221.815	222.815	223.815	224.815	225.815	226.815	38.433.136	38.433.136	114.766.000	74.832.640	183.860.400	59.400.400
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1.016.573	1.080.251	1.107.257	1.134.264	1.161.270	1.215.283	1.242.289	166.445.500	180.000.000	185.000.000	190.000.000	195.000.000	200.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	21.621	21.735	21.954	22.054	22.154	22.254	22.354	20.952.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	393.077	409.400	429.865	484.439	504.904	525.369	552.655	23.345.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar	Orang	3.993	4.109	4.263	4.417	4.571	4.725	4.879	59.972.950	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	516	520	530	540	550	560	570	25.787.500	23.730.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	4.318	4.343	4.373	4.405	4.440	4.478	4.518	10.169.000	27.740.800	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000
				Pengelolaan Kawasan tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	1	2	3	3	4	4	5	10.330.000	30.990.000	30.990.000	30.990.000	30.990.000	30.990.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	25.776	42.077	36.155	31.189	27.646	24.947	22.864	72.285.950	700.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	33.970	34.923	34.000	34.500	35.000	36.000	37.000	38.479.000	50.000.000	50.000.000	550.000.000	550.000.000	600.000.000
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	60.860.000	101.674.000	140.000.000	177.000.000	215.000.000	255.000.000
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	185.628.200	200.000.000	220.000.000	240.000.000	260.000.000	280.000.000
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis	Jumlah orang dengan tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	7.438	7.792	6.695	5.776	5.120	4.620	4.234	28.712.000	700.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	165	168	200	300	350	400	450	22.110.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan suspect Malaria yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	3	3	3	3	3	3	3	29.823.500	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	665.689.900	700.000.000	750.000.000	800.000.000	850.000.000	900.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	18.999.900	40.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana sesuai standar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	21.238.400	37.767.500	38.000.000	39.000.000	40.000.000	41.000.000
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	23.787.400	40.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	92.180.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000	175.000.000	200.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Kerja dan Olahraga	Kesehatan Kerja dan Olahraga														
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	209.500.900	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	41.455.950	100.000.000	100.000.000	125.000.000	125.000.000	150.000.000
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	144.330.000	341.007.500	342.000.000	343.000.000	344.000.000	345.000.000
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	44.609.405.980	44.610.654.680	45.000.000.000	45.500.000.000	46.000.000.000	46.500.000.000
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	81	81	85	90	95	100	105	180.000.000	185.000.000	190.000.000	193.000.000	195.000.000	197.000.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, AsuhanMandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	51.433.450	76.892.900	77.000.000	78.000.000	79.000.000	80.000.000
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1	5	5	10	10	15	15	8.028.000	8.028.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	340.000.000	380.000.000	4.000.000.000	415.000.000	430.000.000	450.000.000
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	350.000.000	370.000.000	390.000.000	400.000.000	410.000.000	420.000.000
		terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan UKM dan UKP	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1	1	1	1	1	1	1	100.000.000	130.000.000	150.000.000	170.000.000	190.000.000	200.000.000
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1.348.524.200	600.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Paket	0	1	1	1	1	1	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	3	3	3	3	3	3	22.566.796.787	15.132.542.000	15.000.000.000	16.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	1	2	2	2	2	2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	1	2	2	2	2	2	1.239.716.700	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	1	1	1	1	1	2.476.890.000	2.476.890.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	8	1	2	2	2	2	4.400.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	1	2	2	2	2	2	4.400.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	50.000	62.500	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000	13.886.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000
		Tersedianya data dan informasi kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	670.000.000	705.000.000	850.000.000	1.100.000.000	1.275.000.000	1.579.000.000
		Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	16	16	16	16	16	16	16	16.388.800	46.506.000	48.000.000	50.000.000	52.000.000	54.000.000
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan KesehatanLainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	16	16	16	17	17	17	17	9.999.632	9.999.800	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	10	16	16	16	16	16	16	15.700.944	20.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	30.000.000
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	54	54	54	54	54	54	54	1.490.685.600	150.000.000	155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (RIBK)	%	60,52	73,68	75	77	80	90	100						
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (RIBK)	per 1.000 penduduk	2,08	2,14	2,14	2,15	2,16	2,16	2,17						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (RIBK)	%	66,66	66,66	100	100	100	100	100						
		Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota																
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	13.190.800	13.190.800	15.000.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan UKP dan UKM	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	60	65	70	75	80	90	100	80.000.000	90.000.000	150.000.000	180.000.000	200.000.000	250.000.000
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	250	275	300	300	300	300	300	225.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000	370.000.000	380.000.000
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, dan MAKANAN MINUMAN**				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (RIBK)	%	NA	11,27	20,95	30,63	40,32	50	60						
					Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (RIBK)	%	NA	75	76	77	78	79	80						
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (RIBK)	%	NA	54	58	62	66	70	74						
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara	%	NA	100	100	100	100	100	100						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					persyaratan perizinan (RIBK)														
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (RIBK)	%	NA	83,5	84	84,5	85	85,5	90						
		Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	40	250	250	250	250	250	250	188.733.500	190.000.000	192.000.000	195.000.000	198.000.000	200.000.000
		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	86.906.632	121.652.500	125.000.000	127.000.000	129.000.000	130.000.000
		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	35.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	2	16	32	48	64	80	96						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	207.614.250	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	750.000.000
UPTD Labkesda																			
Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Indeks	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00						
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	0	23	25	27	29	30	0	23.750.000	26.250.000	28.750.000	31.250.000	33.750.000
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah																

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	1	1	1	1	0	0	50.000.000	75.000.000	100.000.000	125.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	20.127.000	100.224.800	150.224.800	200.224.800	250.224.800	300.224.800
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	15.425.500	50.034.800	70.034.800	90.034.800	120.034.480	150.035.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	33.391.000	49.925.000	66.925.000	83.925.000	100.925.000	117.925.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	13.658.200	29.972.500	44.972.500	59.972.500	74.972.500	89.972.500
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	44.729.756	221.425.000	241.425.000	251.425.000	261.425.000	271.425.000
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai asset	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	2	4	5	6	7	0	32.756.900	40.000.000	43.000.000	45.000.000	50.000.000
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	7	8	10	13	15	46.544.000	146.556.400	150.000.000	200.000.000	250.000.000	270.000.000
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	125.850.000	200.400.000	220.000.000	230.000.000	240.000.000	250.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	136.167.000	282.000.000	290.000.000	295.000.000	300.000.000	305.000.000
		Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	2	2	2	14.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	0	10.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	19.535.000	66.050.000	67.000.000	68.000.000	69.000.000	70.000.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	17.300.000	195.853.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				Tersedianya Pelayanan Laboratorium untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah di Kabupaten Brebes	%	100	100	100	100	100	100	100						
		terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	31.800.000	35.000.000	36.000.000	37.000.000	38.000.000	39.000.000
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Unit	1	1	1	1	1	1	1	51.596.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	70.000.000	10.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan UKM dan UKP di Laboratorium Kesehatan Daerah	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Unit	2	2	2	2	2	2	2	30.000.000	234.441.600	3.030.000.000	3.035.000.000	540.000.000	550.000.000
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Paket	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	80.000.000	100.000.000	120.000.000	140.000.000	150.000.000
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Paket	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000	320.000.000	350.000.000	370.000.000	380.000.000	400.000.000
		Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di UPTD Labkes Kab. Brebes	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	0	200.000.000	200.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**				PresentaseTenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di Laboratorium Kesehatan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100						
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	4	4	4	4	4	4	4	55.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				Terlaksananya PHBS dalam rangka promotif preventif di UPTD Labkesda	%	100	100	100	100	100	100	100						
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	22.440.000	37.740.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000
UPTD KP2K																			
Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan UPTD Balai Pengobatan Paru dan Kusta	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Balai Pengobatan Paru dan Kusta	Indeks	87	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50						
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2	3	3	3	3	1.420.700	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	4	5	5	5	5	10.784.200	15.000.000	18.000.000	20.000.000	23.000.000	25.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	3	4	4	4	4	11.184.000	13.000.000	15.000.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	16.835.000	18.000.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2	3	3	3	3	12.174.500	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	3	3	3	0	0	15.000.000	17.000.000	20.000.000	23.000.000
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	49.980.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	219.464.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000
		Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	2	2	2	1.500.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	5	5	5	5	5	15.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	15.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				Tersedianya Pelayanan Pengobatan Paru dan Kusta untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah di Kabupaten Brebes	%	100	100	100	100	100	100	100						
		terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP di Laboratorium Kesehatan Daerah	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	Unit	0	0	1	1	1	1	1	0	50.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan UKM dan UKP di Laboratorium Kesehatan Daerah	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	5	8	3	2	1	0	600.000.000	800.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	Paket	3	3	3	3	3	3	3	30.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		Tersedianya data dan informasi kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	28.000.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000	31.500.000	32.000.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**				PresentaseTenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	%	100	100	100	100	100	100	100						
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	0	0	10	10	10	10	10	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan tentang Pengobatan Paru dan Kusta	%	0	88	89	89,5	90	90,5	91						
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Balai PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	3.900.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
RSUD																			
Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan RSUD KAB. BREBES	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/ KOTA**				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Brebes	Indeks	83	84	85	85	85	85	85						
					Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan	Indeks	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87						
					Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Bumiayu	Indeks	81,25	81,50	82	82,50	83	83,50	84						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Kab. Brebes	Peningkatan Pelayanan BLUD																
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Brebes	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	240.000.000.000	252.000.000.000	264.600.000.000	277.830.000.000	291.721.500.000	306.307.575.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Ir. Soekarno	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	13.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	45.000.000.000	65.000.000.000	80.000.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Bumiayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	30.700.000.000	31.467.000.000	33.040.000.000	34.692.000.000	36.427.000.000	38.248.000.000
UOBF PUSKESMAS																			
Survey Kepuasan masyarakat terahadap pelayanan Puskesmas Kab. Brebes	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Brebes	Indeks	79,16	80	81	82	83	84	85						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tanjung	Indeks	87,91	89	90	90,5	91	91	91,5						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Banjarharjo	Indeks	78,88	81,59	82	83	84	85	86						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bumiayu	Indeks	77,89	80,83	83	84	85	86	87						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Paguyangan	Indeks	86,27	86,40	86,60	86,80	87,00	87,20	87,40						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bandungsari	Indeks	82,26	82,87	82,98	83,1	83,21	83,32	83,43						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bantarkawung	Indeks	88,65	88,7	88,75	88,8	88,85	88,9	88,95						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bentar	Indeks	88,99	88,9	90	90,1	90,2	90,3	90,4						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bojongsari	Indeks	85,79	85,8	85,8	85,8	85,81	85,81	85,81						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Buaran	Indeks	88,9	88,9	89,1	89,3	89,6	89,8	85						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bulakamba	Indeks	87,98	88	88,02	88,04	88,06	88,08	88,1						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikakak	Indeks	86,65	87	88	88,2	88,3	88,4	88,5						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikeusal Kidul	Indeks	85,88	85,89	85,91	85,93	85,94	85,95	85,96						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jagalempeni	Indeks	84,94	85	85	85	85	85	85						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatibarang	Indeks	89,38	89,45	89,52	89,59	89,66	89,73	89,85						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatirokeh	Indeks	83,52	84	84,25	84,5	84,75	85	85,25						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaligangsa	Indeks	83,88	84,30	84,75	85,10	85,50	85,80	86,00						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kalimati	Indeks	88,34	88,5	88,66	88,75	89	89,25	89,24						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaliwadas	Indeks	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86	86,2						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kecipir	Indeks	82,52	83,19	83,39	83,59	83,79	84	84,2						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kemurang Wetan	Indeks	82,66	83	83,2	83,4	83,6	83,8	84						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kersana	Indeks	88,71	89,21	89,71	90,21	90,71	91,21	91,71						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Ketanggungan	Indeks	78,09	80,31	80,41	80,51	80,61	80,71	80,81						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Klikiran	Indeks	85,21	85,30	85,50	85,70	85,90	86,10	86,30						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kluwut	Indeks	80,8	82	84	86	88	90	92						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kutamendala	Indeks	83,47	83,7	83,93	84,16	84,39	84,62	84,85						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Larangan	Indeks	84,44	84,94	85,44	85,94	86,44	86,94	87,44						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Losari	Indeks	80,38	82,8	84,42	86,04	87,66	89,28	90,9						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Luwunggede	Indeks	83,9	83,93	83,93	84,13	84,33	84,53	84,7						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Pemaron	Indeks	80,54	80,80	81,20	81,50	82,00	82,80	83,00						

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Salem	Indeks	89,21	89,3	89,4	89,5	89,6	89,7	89,8						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sidamulya	Indeks	83,59	83,8	84	84,2	84,4	84,6	84,8						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sirampog	Indeks	82,64	82,89	83	83,5	84	84,5	85						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sitanggal	Indeks	83,79	83,85	84,1	84,5	84,75	85,25	85,5						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Siwuluh	Indeks	80,99	81,9	82,9	83,9	84,9	85,9	86,9						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tonjong	Indeks	82,85	81,21	82,85	82,9	83,5	84	85						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Wanasari	Indeks	87,35	83,02	84	84,5	85	85,5	86						
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Winduaji	Indeks	88,34	86,83	87,03	87,23	87,43	87,63	87,83						
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD																
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Brebes	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.468.000.000	3.326.319.000	3.359.582.000	3.393.178.000	3.427.109.000	3.450.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.818.492.000	3.954.075.000	4.116.575.000	4.220.075.000	4.334.075.000	4.350.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Banjarharjo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	5.194.529.236	520.000.000	5.210.000.000	5.220.000.000	5.230.000.000	5.240.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bumiayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.665.029.007	3.325.964.000	3.492.261.000	3.666.875.000	3.850.218.000	4.427.751.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Paguyangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.566.455.601	3.016.181.000	3.200.000.000	3.225.000.000	3.250.000.000	3.275.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandungsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.580.506.090	3.580.607.000	3.580.707.000	3.580.807.000	3.580.907.000	3.581.007.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bantarkawung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	4.517.077.000	4.562.247.000	4.607.870.000	4.653.948.000	4.700.488.000	4.747.493.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bentar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	2.302.532.000	2.303.532.000	2.304.032.000	2.304.532.000	2.305.032.000	2.305.532.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bojongsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.068.556.000	3.068.556.000	3.093.556.000	3.119.556.000	3.143.556.000	3.143.556.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Buaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	2.350.372.000	2.355.372.000	2.360.372.000	2.365.372.000	2.370.372.000	2.375.372.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulakamba	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.597.923.000	3.633.902.230	3.670.241.253	3.706.943.665	3.744.013.102	3.781.453.233
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cikakak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.112.778.000	3.122.878.000	3.132.978.000	3.143.078.000	3.153.178.000	3.163.278.000
				Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Puskesmas Cikeusal Kidul	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	4.654.567.293	4.660.000.000	4.665.000.000	4.670.000.000	4.675.000.000	4.680.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jagalempeni	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.183.380.000	3.183.380.000	3.183.380.000	3.183.380.000	3.183.380.000	3.183.480.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatibarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.775.560.000	3.800.000.000	3.810.000.000	3.825.000.000	3.835.000.000	3.850.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jatirokeh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	4.600.000.000	4.650.000.000	4.700.000.000	4.750.000.000	4.800.000.000	4.850.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kaligangsa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.934.844.861	1.935.800.000	1.935.900.000	1.936.400.000	1.936.550.000	1.936.800.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kalimati	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.130.777.754	1.187.400.000	1.246.800.000	1.310.000.000	1.376.000.000	1.445.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kaliwadas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.787.296.000	1.787.396.000	1.787.496.000	1.787.596.000	1.787.696.000	1.787.796.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kecipir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.917.200.000	1.927.200.000	1.937.200.000	1.947.200.000	1.957.200.000	1.967.200.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kemurang Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.736.382.846	1.823.201.988	1.914.362.088	2.010.080.192	2.110.584.202	2.110.584.202
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kersana	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.918.588.193	4.168.588.193	4.418.588.193	4.668.588.193	4.918.588.193	5.168.588.193
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ketanggungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	4.331.249.166	4.335.000.000	4.360.000.000	4.385.000.000	4.410.000.000	4.435.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Klikiran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.569.325.937	1.685.019.196	1.743.521.115	1.830.697.170	1.922.232.028	1.928.343.629
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kluwut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.046.200.000	2.824.228.000	2.937.312.000	3.050.658.000	3.144.271.000	320.710.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamendala	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.598.704.000	1.603.000.000	1.608.000.000	1.613.000.000	1.618.000.000	1.623.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Larangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	5.113.030.372	5.213.030.372	5.313.030.372	5.413.030.372	5.513.030.372	5.613.030.372
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Losari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	4.643.438.364	3.824.062.000	4.015.265.000	4.216.028.000	4.426.829.000	4.648.171.000

KINERJA/ OUTCOME	PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2025-2030							PAGU INDIKATIF (Rp)					
							BASELINE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Luwunggede	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.791.934.000	1.791.934.000	1.795.518.000	1.799.109.000	1.802.708.000	1.806.333.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pemaron	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1.636.279.868	1.636.500.000	1.636.800.000	1.637.250.000	1.637.300.000	1.637.500.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Salem	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	2.643.511.614	2.650.511.614	2.660.511.614	2.665.511.614	2.670.511.614	2.685.511.614
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sidamulya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.088.163.730	3.098.163.730	3.108.163.730	3.118.163.730	3.128.163.730	3.138.163.730
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sirampog	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.850.000.000	3.850.000.000	3.850.000.000	3.850.000.000	3.850.000.000	3.850.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sitanggal	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	5.027.882.288	5.050.000.000	5.100.000.000	5.150.000.000	5.200.000.000	5.250.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Siwuluh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.392.122.893	3.397.122.893	3.402.122.893	3.407.122.893	3.412.122.893	3.417.122.893
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tonjong	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	2.418.575.381	2.466.946.888	2.516.285.825	2.566.611.541	2.617.943.771	2.670.302.646
				Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Puskesmas Wanasari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	3.759.869.667	3.824.955.000	3.830.000.000	3.836.000.000	3.850.000.000	3.860.000.000
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Winduaji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1	1	2.590.000.000	2.642.000.000	2.668.500.000	2.695.000.000	2.722.000.000	2.750.000.000

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan
1.	Beresi Fasilitas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Operasional Pelayanan Puskesmas
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Pembangunan Puskesmas
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2.	Beresi Angka Kematian Ibu dan Anak	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Tercapainya masyarakat yang sehat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan
		dan Upaya Kesehatan Masyarakat	sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
3.	Antisipasi Pandemi dan Penyakit Menular	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
				Pengelolaan Layanan Imunisasi
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan
4.	Pemberdayaan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.	Fungsi Perangkat Daerah	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
				Pengelolaan Kawasan tanpa Rokok
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Pemberdayaan faskes	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pemberdayaan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Daerah sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029. Berikut ini indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,18	74,37	74,55	74,74	74,92	75,11	75,30
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	54	51	48	45	42	39	36
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,73	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,46
4	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	15,9	15,79	14,78	14,12	13,61	13,11	12,61
5	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	%	71,86	72	72,5	73	73,5	74	75
6	Desa Siaga Aktif Mandiri	%	37,71	40	44	48	52	56	60
7	Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	Indeks	88,16	88,2	88,25	88,3	88,35	88,4	88,45
8	Nilai SAKIP OPD	Angka	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mencapai target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Kematian Ibu	kasus	54	51	48	45	42	39	36
2	Prevalensi Stunting	%	23,1	21	20,75	20	19,25	18,5	17,5
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (K6)	%	85,8	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87,24	100	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	87,63	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	88,81	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,40	100	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,23	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83,43	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	57,62	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,93	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	77,75	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	61,15	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	93,06	100	100	100	100	100	100
15	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,73	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,46
16	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	15,9	15,79	14,78	14,12	13,61	13,11	12,61
17	Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	Indeks	88,16	88,2	88,25	88,3	88,35	88,4	88,45
18	Nilai SAKIP OPD	Angka	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. Selain itu Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes TA 2025 - 2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Selain itu penyusunan Renstra Dinkesda juga diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Induk Bidang Kesehatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur, beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci serta Indikator Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, tentunya Dinkesda tidak dapat berjalan sendirian, melainkan butuh dukungan dan Keterlibatan seluruh unsur jajaran kesehatan, dan peran lintas sektor di Kabupaten Brebes. Dengan begitu permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya guna dapat terwujud.

Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan untuk lima tahun mendatang. Sekaligus sebagai wujud implementasi rencana pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2029 guna mewujudkan Brebes sebagai kabupaten yang Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat dan Sejahtera.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. POHON KINERJA (POKIN)
DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

Mewujudkan akses dan layanan kesehatan yang semakin berkualitas

Ik : Umur Harapan Hidup (RIBK);
Ik : Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita.

Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Ik : Nilai SAKIP OPD;
Ik : Indeks Kepuasan Masyarakat OPD;

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daaerah

Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah

Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau

Ik : Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (RIBK)

Meningkat nya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

Ik : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Ik : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Ik : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Ik : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Ik : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Ik : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Ik : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Ik : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah

Ik : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Ik : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Ik : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Ik : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Ik : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Ik : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah

Ik : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Ik : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Ik : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Ik : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Ik : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Ik : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Ik : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya data dan informasi kesehatan

Ik : Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset

Ik : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Ik : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Ik : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Ik : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Ik : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Ik : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Ik : JJumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah

Ik : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ik : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Ik : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Ik : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Ik : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Ik : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Ik : Jumlah Mebel yang Dipelihara

Ik : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Ik : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Ik : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Ik : Jumlah Mebel yang Dipelihara

Ik : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Mewujudkan akses dan layanan kesehatan yang semakin berkualitas

Ik : Umur Harapan Hidup (RIBK);
Ik : Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan,pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan di Kabupaten Brebes

Ik : Jumlah Kematian Ibu (RIBK);
Ik : Angka Kematian Bayi;
Ik : Jumlah Kematian Balita;
Ik : Cakupan pelayanan kesehatan esensial Kab. Brebes;
Ik : Desa Siaga Aktif Mandiri;

Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau

Ik : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6)
Ik : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K4)
Ik : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Ik : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan (indikator SDGs)
Ik : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (indikator SDGs)
Ik : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Ik : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Ik : Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Indikator SDGs)
Ik : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar
Ik : Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Ik : Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar
Ik : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Ik : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)
Ik : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Ik : Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Ik : Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (RIBK)
Ik : Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)
Ik : Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Ik : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Ik : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Ik : Presentase Orang Penderita Penyakit menular dan tidak menular Mendapatkan Pelayanan Sesuai standar
Ik : Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate/TSR) (RIBK)
Ik : Cakupan penemuan kasus TB (Treatment Coverage) (RIBK)
Ik : Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (indikator SDGs)
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar
Ik : Presentase orang dengan Pelayanan Kesehatan Orang dengan suspect Malaria sesuai standar
Ik : Cakupan imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 Bulan (IDL) (RIBK)
Ik : Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan (indikator SDGs)
Ik : Persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheri tetanus (3 dosis DPT) (Indikator Pelayanan Esensial)
Ik : cakupan puskesmas yang melayani kesehatan pasca bencana, Wabah dan KLB
Ik : Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (RIBK)
Ik : Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (RIBK)
Ik : Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat (RIBK)
Ik : Puskesmas yang menyelenggarakan KKS
Ik : Persentase puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
Ik : Persentase puskesmas yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara
Ik : Persentase puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) Memenuhi Syarat
Ik : Persentase puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat
Ik : Persentase puskesmas yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan
Ik : Fasyankes (RS dan puskesmas) memenuhi layanan kesling kunci
Ik : Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)
Ik : Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (RIBK)
Ik : Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) (SDG's)
Ik : Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (RIBK)
Ik : Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (RIBK)
Ik : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)
Ik : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (RIBK)
Ik : Persentase posyandu aktif siklus hidup (RIBK)
Ik : Persentase lanjut usia yang mandiri (RIBK)
Ik : Persentase merokok penduduk 10 - 21 tahun (RIBK)

Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan

Ik : Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (RIBK)
Ik : Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
Ik : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Ik : Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (RIBK)

Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman

Ik :Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (RIBK)
Ik : Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (RIBK)
Ik : Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (RIBK)
Ik : Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (RIBK)
Ik : Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang

Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Ik : Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan

terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP

Ik :Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Ik : Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Ik : Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Ik : Jumlah Balita mendapat pelayanan kesehatan standar
Ik : Jumlah Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayan kesehatan Standar
Ik : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Ik : Jumlah Usia Produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar usia
Ik : Jumlah Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Ik : Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Ik : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar
Ik : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Ik : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Ik : Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok
Ik : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Ik : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Ik : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Ik : Jumlah orang dengan tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
Ik : Jumlah ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Ik : Jumlah orang dengan suspect Malaria yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana sesuai standar
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Lingkungan
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Ik : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Ik : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Ik : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
Ik : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
Ik : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan UKM dan UKP

Ik : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
Ik : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Ik : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
Ik : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
Ik : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
Ik : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
Ik : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
Ik : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
Ik : Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas

Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Ik : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Ik : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Ik : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
Ik : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan

Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan UKP dan UKM

Ik : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Ik : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya

Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,

Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan

Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat

Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air

Ik : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan

Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ik : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

LAMPIRAN 2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

DINAS KESEHATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH										
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,18	74,37	74,55	74,74	74,92	75,11	75,30	
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	23,1	21	20,75	20	19,25	18,5	17,75	
3	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Persentase	71,86	72	72,5	73	73,5	74	75	
4	Desa Siaga Aktif Mandiri	%	37,71	40	44	48	52	56	60	

LAMPIRAN 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH									
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,18	74,37	74,55	74,74	74,92	75,11	75,30	
3.	Angka Kematian Balita (Per 1000 KH)	Per 1000	15,9	15,79	14,78	14,12	13,61	13,11	12,61	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80	
5.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	54	51	48	45	42	39	36	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	88,16	88,2	88,25	88,3	88,35	88,4	88,45	
7.	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Per 1000	12,73	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,46	
8.	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Persentase	71,86	72	72,5	73	73,5	74	75	
9.	Desa Siaga Aktif Mandiri	%	37,71	40	44	48	52	56	60	

LAMPIRAN 4. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

DINAS KESEHATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Angka Kematian Balita (Per 1000 KH)		Per 1000	15,9	15,79	14,78	14,12	13,61	13,11	12,61	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80	
4.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	negatif	Kasus	54	51	48	45	42	39	36	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Indeks	88,16	88,2	88,25	88,3	88,35	88,4	88,45	
6.	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	negatif	Per 1000	12,73	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,46	
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6)	positif	%	85,8	100	100	100	100	100	100	
8.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	88,81	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	%	93,06	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	%	61,15	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	75,23	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	98,93	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	57,62	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	positif	%	83,43	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	%	77,75	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	20,5	
16.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	93,4	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	%	87,63	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	%	87,24	100	100	100	100	100	100	

LAMPIRAN 5. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				744.623.052.220,00		800.787.937.315,00		828.714.438.597,00		868.973.739.951,00		903.296.391.730,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				655.710.490.704,00		691.378.498.715,00		720.631.861.357,00		760.740.346.951,00		793.760.126.730,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Banjarharjo (Indeks)	78,88	82	655.710.490.704,00	83	691.378.498.715,00	84	720.631.861.357,00	85	760.740.346.951,00	86	793.760.126.730,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kecipir (Indeks)	82,52	83,39		83,59		83,79		84		84,2			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaliwadas (Indeks)	85	85,4		85,6		85,8		86		86,2			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kalimati (Indeks)	88,34	88,66		88,75		89		89,25		89,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaligangsa (Indeks)	83,88	84,75		85,10		85,50		85,80		86			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatirokeh (Indeks)	83,52	84,25		84,50		84,75		85		85,25			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatibarang (Indeks)	89,38	89,52		89,59		89,66		89,73		89,85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jagalempeni (Indeks)	84,94	85		85		85		85		85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikeusal Kidul (Indeks)	85,88	85,91		85,93		85,94		85,95		85,96			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikakak (Indeks)	86,65	88		88,2		88,3		88,4		88,5			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bumiayu (Indeks)	77,89	83		84		85		86		87			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bulakamba (Indeks)	87,98	88,02		88,04		88,06		88,08		88,1			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Buaran (Indeks)	88,9	89,1		89,3		89,6		89,8		85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Brebes (Indeks)	79,16	81		82		83		84		85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bojongsari (Indeks)	85,79	85,8		85,8		85,81		85,81		85,81			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bentar (Indeks)	88,99	90		90,1		90,2		90,3		90,4			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bantarkawung (Indeks)	88,65	88,75		88,8		88,85		88,9		88,95			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bandungsari (Indeks)	82,26	82,98		83,10		83,21		83,32		83,43			
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Indeks)	85	87		88		89		90		91			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Balai Pengobatan Paru dan Kusta (Indeks)	87	88,5		89		89,5		90		90,5			
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan (Indeks)	84	85		85,5		86		86,5		87			
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Bumiayu (Indeks)	81,25	82		82,50		83		83,50		84			
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Brebes (Indeks)	83	85		85		85		85		85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Winduaji (Indeks)	88,34	87,03		87,23		87,43		87,63		87,83			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Wanasari (Indeks)	87,35	84		84,5		85		85,5		86			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tonjong (Indeks)	82,85	82,85		82,9		83,5		84		85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tanjung (Indeks)	87,91	90		90,5		91		91		91,5			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Siwuluh (Indeks)	80,99	82,9		83,9		84,9		85,9		86,9			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sitanggal (Indeks)	83,79	84,1		84,5		84,75		85,25		85,5			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sirampog (Indeks)	82,64	83		83,5		84		84,5		85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sidamulya (Indeks)	83,59	84		84,2		84,4		84,6		84,8			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Salem (Indeks)	89,21	89,4		89,5		89,6		89,7		89,8			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Pemaron (Indeks)	80,54	81,20		81,50		82		82,80		83			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Paguyangan (Indeks)	86,27	86,60		86,80		87		87,20		87,40			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Luwunggede (Indeks)	83,9	83,93		84,13		84,33		84,53		84,7			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Losari (Indeks)	80,38	84,42		86,04		87,66		89,28		90,9			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Larangan (Indeks)	84,44	85,44		85,94		86,44		86,94		87,44			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kutamendala (Indeks)	83,47	83,93		84,16		84,39		84,62		84,85			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kluwut (Indeks)	80,8	84		86		88		90		92			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Klikiran (Indeks)	85,21	85,50		85,70		85,90		86,10		86,30			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Ketanggungan (Indeks)	78,09	80,41		80,51		80,61		80,71		80,81			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kersana (Indeks)	88,71	89,71		90,21		90,71		91,21		91,71			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kemurang Wetan (Indeks)	82,66	83,2		83,4		83,6		83,8		84			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				230.544.400,00		258.500.000,00		284.000.000,00		309.500.000,00		341.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	230.544.400,00	1	258.500.000,00	1	284.000.000,00	1	309.500.000,00	1	341.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1				1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				104.999.800,00		105.000.000,00		106.000.000,00		107.000.000,00		108.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	104.999.800,00	1	105.000.000,00	1	106.000.000,00	1	107.000.000,00	1	108.000.000,00		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9.499.800,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	9.499.800,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9.999.900,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	9.999.900,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.999.900,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.999.900,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.150.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.150.000,00	1	3.500.000,00		4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				68.895.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		83.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	68.895.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	83.000.000,00		
1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				15.000.000,00		27.000.000,00		35.000.000,00		43.000.000,00		55.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	27.000.000,00	1	35.000.000,00	1	43.000.000,00	1	55.000.000,00		
1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000,00		27.000.000,00		35.000.000,00		43.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	15.000.000,00	1	27.000.000,00	1	35.000.000,00	1	43.000.000,00	1	55.000.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				220.598.561.250,00		222.802.485.532,00		225.029.487.887,00		227.278.706.266,00		229.550.389.918,00		
Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.445	2.846	220.598.561.250,00	3.081	222.802.485.532,00	3.316	225.029.487.887,00	3.551	227.278.706.266,00	3.785	229.550.389.918,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				220.073.488.150,00		222.276.485.532,00		224.501.487.887,00		226.748.706.266,00		229.018.389.918,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.445	2.846	220.073.488.150,00	3.081	222.276.485.532,00	3.316	224.501.487.887,00	3.551	226.748.706.266,00	3.785	229.018.389.918,00		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				156.290.700,00		157.000.000,00		158.000.000,00		159.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	156.290.700,00	1	157.000.000,00	1	158.000.000,00	1	159.000.000,00	1	160.000.000,00		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				368.782.400,00		369.000.000,00		370.000.000,00		371.000.000,00		372.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	368.782.400,00	1	369.000.000,00	1	370.000.000,00	1	371.000.000,00	1	372.000.000,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				513.414.300,00		565.000.000,00		596.000.000,00		630.000.000,00		672.000.000,00		
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	513.414.300,00	1	565.000.000,00	1	596.000.000,00	1	630.000.000,00	1	672.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				238.750.000,00		255.000.000,00		267.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	238.750.000,00	1	255.000.000,00	1	267.000.000,00	1	280.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				128.754.300,00		140.000.000,00		151.000.000,00		163.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	128.754.300,00	1	140.000.000,00	1	151.000.000,00	1	163.000.000,00	1	175.000.000,00		
1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				145.910.000,00		170.000.000,00		178.000.000,00		187.000.000,00		197.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1	145.910.000,00	1	170.000.000,00	1	178.000.000,00	1	187.000.000,00	1	197.000.000,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.057.841.850,00		2.227.082.100,00		2.392.082.100,00		2.579.081.780,00		2.757.582.300,00		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2.057.841.850,00	1	2.227.082.100,00	1	2.392.082.100,00	1	2.579.081.780,00	1	2.757.582.300,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				51.988.600,00		102.500.000,00		131.000.000,00		159.500.000,00		189.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	51.988.600,00	1	102.500.000,00	1	131.000.000,00	1	159.500.000,00	1	189.000.000,00		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				259.154.200,00		278.224.800,00		335.224.800,00		393.224.800,00		450.224.800,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	259.154.200,00	1	278.224.800,00	1	335.224.800,00	1	393.224.800,00	1	450.224.800,00		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				97.993.800,00		120.034.800,00		144.034.800,00		180.034.480,00		213.035.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	97.993.800,00	1	120.034.800,00	1	144.034.800,00	1	180.034.480,00	1	213.035.000,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				207.842.000,00		231.925.000,00		257.925.000,00		285.925.000,00		312.925.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	207.842.000,00	1	231.925.000,00	1	257.925.000,00	1	285.925.000,00	1	312.925.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				86.688.500,00		112.972.500,00		129.972.500,00		147.972.500,00		165.972.500,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	86.688.500,00	1	112.972.500,00	1	129.972.500,00	1	147.972.500,00	1	165.972.500,00		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				36.600.000,00		38.000.000,00		39.500.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	36.600.000,00	1	38.000.000,00	1	39.500.000,00	1	42.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.317.574.750,00		1.343.425.000,00		1.354.425.000,00		1.370.425.000,00		1.381.425.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	1.317.574.750,00	2	1.343.425.000,00	2	1.354.425.000,00	2	1.370.425.000,00	2	1.381.425.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.600.314.100,00		3.948.000.000,00		4.100.000.000,00		4.303.000.000,00		4.428.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki Nilai Aset	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.600.314.100,00	1	3.948.000.000,00	1	4.100.000.000,00	1	4.303.000.000,00	1	4.428.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	17		22		23		24		25			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	8		9		11		14		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				371.158.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	371.158.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000,00		430.000.000,00		450.000.000,00		470.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	400.000.000,00	1	430.000.000,00	1	450.000.000,00	1	470.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				154.143.700,00		178.000.000,00		185.000.000,00		193.000.000,00		203.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	17	154.143.700,00	22	178.000.000,00	23	185.000.000,00	24	193.000.000,00	25	203.000.000,00		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7	35.000.000,00	7	40.000.000,00	7	45.000.000,00	7	50.000.000,00	7	55.000.000,00		
1.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.250.000.000,00		2.300.000.000,00		2.350.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000,00	2	2.200.000.000,00	2	2.250.000.000,00	2	2.300.000.000,00	2	2.350.000.000,00		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				293.456.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	293.456.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				146.556.400,00		200.000.000,00		270.000.000,00		340.000.000,00		370.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	8	146.556.400,00	9	200.000.000,00	11	270.000.000,00	14	340.000.000,00	16	370.000.000,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.197.945.000,00		5.205.500.000,00		5.235.500.000,00		5.265.500.000,00		5.295.500.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	5.197.945.000,00	1	5.205.500.000,00	1	5.235.500.000,00	1	5.265.500.000,00	1	5.295.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.053.396.000,00		1.020.000.000,00		1.030.000.000,00		1.040.000.000,00		1.050.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.053.396.000,00	1	1.020.000.000,00	1	1.030.000.000,00	1	1.040.000.000,00	1	1.050.000.000,00		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.124.049.000,00		4.165.000.000,00		4.180.000.000,00		4.195.000.000,00		4.210.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	4.124.049.000,00	1	4.165.000.000,00	1	4.180.000.000,00	1	4.195.000.000,00	1	4.210.000.000,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.259.796.700,00		1.460.000.000,00		1.552.000.000,00		1.632.000.000,00		1.707.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	1.259.796.700,00	1	1.460.000.000,00	1	1.552.000.000,00	1	1.632.000.000,00	1	1.707.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1		2		2		2		2			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		250.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	325.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				272.293.500,00		295.000.000,00		297.000.000,00		319.000.000,00		331.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	272.293.500,00	3	295.000.000,00	3	297.000.000,00	3	319.000.000,00	3	331.000.000,00		
1.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				8.000.000,00		18.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1	8.000.000,00	2	18.000.000,00	2	22.000.000,00	2	24.000.000,00	2	26.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				245.982.200,00		257.000.000,00		268.000.000,00		274.000.000,00		285.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	245.982.200,00	7	257.000.000,00	7	268.000.000,00	7	274.000.000,00	7	285.000.000,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				733.521.000,00		565.000.000,00		580.000.000,00		595.000.000,00		610.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	733.521.000,00	3	565.000.000,00	3	580.000.000,00	3	595.000.000,00	3	610.000.000,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				424.252.073.104,00		454.911.931.083,00		481.442.791.370,00		518.742.558.905,00		549.008.654.512,00		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD dan Puskesmas Kabupaten Brebes	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	41	41	424.252.073.104,00	41	454.911.931.083,00	41	481.442.791.370,00	41	518.742.558.905,00	41	549.008.654.512,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				424.252.073.104,00		454.911.931.083,00		481.442.791.370,00		518.742.558.905,00		549.008.654.512,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	41	41	424.252.073.104,00	41	454.911.931.083,00	41	481.442.791.370,00	41	518.742.558.905,00	41	549.008.654.512,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				87.695.478.216,00		108.005.438.600,00		106.515.577.240,00		106.511.393.000,00		107.586.265.000,00		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Jumlah Kematian Balita (Kasus)	372	357	87.695.478.216,00	349	108.005.438.600,00	342	106.515.577.240,00	334	106.511.393.000,00	327	107.586.265.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	
	Persentase puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	0	5,26		7,89		10,52		13,15		18,42			
	Persentase puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) Memenuhi Syarat (%)	30	44,73		50		52,63		57,89		63,16			
	Persentase puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan (%)	0	7,89		10,52		13,16		18,42		23,68			
	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan (%)	0	7,89		10,52		13,15		15,78		21,05			
	Persentase puskesmas yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara (%)	0	5,26		7,89		10,52		13,15		18,42			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat (%)	0	35		40		45		50		60			
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	83,43	100		100		100		100		100			
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	77		79		81		83		85			
	Presentase orang dengan Pelayanan Kesehatan Orang dengan suspect Malaria sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Presentase Orang Penderita Penyakit menular dan tidak menular Mendapatkan Pelayanan Sesuai standar (%)	97,26	100		100		100		100		100			
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	1,5		2		2		2		2,5			
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,8	19		18		17		16		15			
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	8	7,6		7,4		7,2		7		6,8			
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	70		80		90		95		100			
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0	7		10		15		17		20			
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	94,63	100		100		100		100		100			
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)	100	85		88		92		95		96			
	Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (Unit)	38	38		38		38		38		38			
	Tersedianya Pelayanan Pengobatan Paru dan Kusta untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah di Kabupaten Brebes (%)	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98,31	97,7		97,8		97,9		98		98,1			
	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (%)	57,14	59		60		61		62		63			
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	75,16	71,71		71,81		71,91		72,01		72,11			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	88,81	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus pneumonia pada Balita (%)	67,29	72		74		76		78		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penemuan kasus TB (Treatment Coverage) (%)	86	91		92		93		94		95			
	cakupan puskesmas yang melayani kesehatan pasca bencana, Wabah dan KLB (%)	100	100		100		100		100		100			
	Fasyankes (RS dan puskesmas) memenuhi layanan kesling kunci (%)	54	54		54		54		54		54			
	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	303	293		288		283		278		273			
	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (%)	5,57	7		8		9		10		11			
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	93,4	100		100		100		100		100			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	87,63	100		100		100		100		100			
	Persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheri tetanus (3 dosis DPT) (%)	87,8	88,5		89		89,5		90		90,5			
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	40		50		60		70		80			
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	13,47	33		45,79		58,59		71,38		84,18			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	35,35	40,40		40,40		47,47		47,47		54,55			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	74,19	74,24		75		75,76		75,76		75,76			
	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	0	85		88		92		95		96			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	87,24	100		100		100		100		100			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K4) (%)	91,1	100		100		100		100		100			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6) (%)	85,8	100		100		100		100		100			
	Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan (%)	95,2	96		96,5		97		97,5		98			
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	24,5		23,5		22,5		21,5		20,5			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	77,75	24,5		23,5		22,5		21,5		20,5			
	Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk (per 100.000 penduduk)	1,28	1,26		1,25		1,24		1,2		1,19			
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	93,06	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	61,15	100		100		100		100		100			
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	75,23	100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar (%)	59,25	62		65		70		72		75			
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,93	100		100		100		100		100			
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	57,62	100		100		100		100		100			
	Persentase posyandu aktif siklus hidup (%)	15,99	44,10		58,16		72,21		86,27		100			
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	79	83		84		85		87		88			
	Cakupan imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 Bulan (IDL) (%)	95,9	97		98		98,5		99		99			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.683.873.600,00		50.050.000.000,00		50.635.000.000,00		49.100.000.000,00		49.060.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan UKM dan UKP	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	1	34.683.873.600,00	2	50.050.000.000,00	2	50.635.000.000,00	2	49.100.000.000,00	2	49.060.000.000,00		
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	8		30		27		14		14			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	50.000	75.000		87.500		100.000		112.500		125.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				2.500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	1	2.500.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.476.890.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	1	2.476.890.000,00	1	6.000.000.000,00	1	6.000.000.000,00	1	6.000.000.000,00	1	6.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				3.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	1	3.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2	6.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1	2	3.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.434.441.600,00		5.830.000.000,00		5.335.000.000,00		2.740.000.000,00		2.650.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	8	1.434.441.600,00	30	5.830.000.000,00	27	5.335.000.000,00	14	2.740.000.000,00	14	2.650.000.000,00		
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				580.000.000,00		600.000.000,00		620.000.000,00		640.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	1	2	580.000.000,00	2	600.000.000,00	2	620.000.000,00	2	640.000.000,00	2	650.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				130.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1	1	130.000.000,00	1	150.000.000,00	1	170.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				15.502.542.000,00		15.400.000.000,00		16.430.000.000,00		17.440.000.000,00		17.460.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	7	7	15.502.542.000,00	7	15.400.000.000,00	7	16.430.000.000,00	7	17.440.000.000,00	7	17.460.000.000,00		
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	50.000	75.000	60.000.000,00	87.500	70.000.000,00	100.000	80.000.000,00	112.500	90.000.000,00	125.000	100.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				51.850.098.816,00		56.606.938.600,00		54.419.577.240,00		55.772.893.000,00		56.581.265.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	51.850.098.816,00	1	56.606.938.600,00	1	54.419.577.240,00	1	55.772.893.000,00	1	56.581.265.000,00		
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1	3		3		4		4		5			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	516	530		540		550		560		570			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.016.573	1.107.257		1.134.264		1.161.270		1.215.283		1.242.289			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	197.414	222.815		223.815		224.815		225.815		226.815			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	393.077	429.865		484.439		504.904		525.369		552.655			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	21.621	21.954		22.054		22.154		22.254		22.354			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	3.993	4.263		4.417		4.571		4.725		4.879			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	25.776	36.155		31.189		27.646		24.947		22.864			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	33.970	34.000		34.500		35.000		36.000		37.000			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	7.438	6.695		5.776		5.120		4.620		4.234			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	4.318	4.373		4.405		4.440		4.478		4.518			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	165	200		300		350		400		450			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25.502	24.756		24.383		24.010		23.637		23.264			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23.759	23.250		23.000		22.750		22.500		22.300			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1	5		10		10		15		15			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	82	87		92		97		102		107			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23.348	22.000		21.800		21.600		21.400		21.200			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	93.373	102.219		103.219		104.219		105.219		106.219			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	79.102	87.209		91.569		96.147		100.954		106.001			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				194.227.800,00		200.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25.502	24.756	194.227.800,00	24.383	200.000.000,00	24.010	250.000.000,00	23.637	270.000.000,00	23.264	300.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				113.467.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23.759	23.250	113.467.000,00	23.000	115.000.000,00	22.750	120.000.000,00	22.500	125.000.000,00	22.300	130.000.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				574.544.900,00		632.000.000,00		695.200.000,00		765.000.000,00		850.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	23.348	22.000	574.544.900,00	21.800	632.000.000,00	21.600	695.200.000,00	21.400	765.000.000,00	21.200	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				290.992.600,00		569.182.600,00		602.554.600,00		431.042.600,00		435.874.600,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	93.373	102.219	290.992.600,00	103.219	569.182.600,00	104.219	602.554.600,00	105.219	431.042.600,00	106.219	435.874.600,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				59.948.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	79.102	87.209	59.948.000,00	91.569	120.000.000,00	96.147	140.000.000,00	100.954	160.000.000,00	106.001	180.000.000,00		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.016.573	1.107.257	180.000.000,00	1.134.264	185.000.000,00	1.161.270	190.000.000,00	1.215.283	195.000.000,00	1.242.289	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				38.433.136,00		114.766.000,00		74.832.640,00		183.860.400,00		59.400.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	197.414	222.815	38.433.136,00	223.815	114.766.000,00	224.815	74.832.640,00	225.815	183.860.400,00	226.815	59.400.400,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	393.077	429.865	60.000.000,00	484.439	65.000.000,00	504.904	70.000.000,00	525.369	75.000.000,00	552.655	80.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	21.621	21.954	60.000.000,00	22.054	65.000.000,00	22.154	70.000.000,00	22.254	75.000.000,00	22.354	80.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	3.993	4.263	60.000.000,00	4.417	65.000.000,00	4.571	70.000.000,00	4.725	75.000.000,00	4.879	80.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				700.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	25.776	36.155	700.000.000,00	31.189	750.000.000,00	27.646	750.000.000,00	24.947	750.000.000,00	22.864	750.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				50.000.000,00		50.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	33.970	34.000	50.000.000,00	34.500	50.000.000,00	35.000	550.000.000,00	36.000	550.000.000,00	37.000	600.000.000,00		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				37.767.500,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	37.767.500,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1	41.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				76.892.900,00		77.000.000,00		78.000.000,00		79.000.000,00		80.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	76.892.900,00	1	77.000.000,00	1	78.000.000,00	1	79.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	800.000.000,00	1	850.000.000,00	1	900.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				27.740.800,00		28.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	4.318	4.373	27.740.800,00	4.405	28.000.000,00	4.440	29.000.000,00	4.478	30.000.000,00	4.518	31.000.000,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				23.730.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	516	530	23.730.000,00	540	50.000.000,00	550	50.000.000,00	560	60.000.000,00	570	70.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				235.000.000,00		256.000.000,00		277.000.000,00		298.000.000,00		319.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	235.000.000,00	1	256.000.000,00	1	277.000.000,00	1	298.000.000,00	1	319.000.000,00		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				44.610.654.680,00		45.000.000.000,00		45.500.000.000,00		46.000.000.000,00		46.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	44.610.654.680,00	1	45.000.000.000,00	1	45.500.000.000,00	1	46.000.000.000,00	1	46.500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				8.028.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1	5	8.028.000,00	10	9.000.000,00	10	10.000.000,00	15	11.000.000,00	15	12.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				380.000.000,00		4.000.000.000,00		415.000.000,00		430.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	380.000.000,00	1	4.000.000.000,00	1	415.000.000,00	1	430.000.000,00	1	450.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				370.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	370.000.000,00	1	390.000.000,00	1	400.000.000,00	1	410.000.000,00	1	420.000.000,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				245.000.000,00		215.000.000,00		218.000.000,00		280.000.000,00		222.000.000,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	82	87	245.000.000,00	92	215.000.000,00	97	218.000.000,00	102	280.000.000,00	107	222.000.000,00		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				341.007.500,00		342.000.000,00		343.000.000,00		344.000.000,00		345.000.000,00		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	341.007.500,00	1	342.000.000,00	1	343.000.000,00	1	344.000.000,00	1	345.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				700.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	7.438	6.695	700.000.000,00	5.776	750.000.000,00	5.120	750.000.000,00	4.620	750.000.000,00	4.234	750.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	165	200	200.000.000,00	300	200.000.000,00	350	250.000.000,00	400	300.000.000,00	450	350.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				30.990.000,00		30.990.000,00		30.990.000,00		30.990.000,00		30.990.000,00		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1	3	30.990.000,00	3	30.990.000,00	4	30.990.000,00	4	30.990.000,00	5	30.990.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				101.674.000,00		140.000.000,00		177.000.000,00		215.000.000,00		255.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	101.674.000,00	1	140.000.000,00	1	177.000.000,00	1	215.000.000,00	1	255.000.000,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				935.000.000,00		1.080.500.000,00		1.181.000.000,00		1.356.500.000,00		1.661.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya data dan informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	935.000.000,00	1	1.080.500.000,00	1	1.181.000.000,00	1	1.356.500.000,00	1	1.661.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				935.000.000,00		1.080.500.000,00		1.181.000.000,00		1.356.500.000,00		1.661.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	935.000.000,00	1	1.080.500.000,00	1	1.181.000.000,00	1	1.356.500.000,00	1	1.661.000.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				226.505.800,00		268.000.000,00		280.000.000,00		282.000.000,00		284.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	10	16	226.505.800,00	16	268.000.000,00	16	280.000.000,00	16	282.000.000,00	16	284.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	16	16		17		17		17		17			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	54	54		54		54		54		54			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				9.999.800,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	16	16	9.999.800,00	17	15.000.000,00	17	20.000.000,00	17	25.000.000,00	17	30.000.000,00		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	10	16	20.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	40.000.000,00	16	30.000.000,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	54	54	150.000.000,00	54	155.000.000,00	54	160.000.000,00	54	165.000.000,00	54	170.000.000,00		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				46.506.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	16	16	46.506.000,00	16	48.000.000,00	16	50.000.000,00	16	52.000.000,00	16	54.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				523.190.800,00		600.000.000,00		650.000.000,00		695.000.000,00		765.000.000,00		
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	60,52	75	523.190.800,00	77	600.000.000,00	80	650.000.000,00	90	695.000.000,00	100	765.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	66,66	100		100		100		100		100			
	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di Laboratorium Kesehatan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,08	2,14		2,15		2,16		2,16		2,17			
	Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di Klinik Pengobatan Paru dan Kusta (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				13.190.800,00		15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	13.190.800,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				13.190.800,00		15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	13.190.800,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				90.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan UKP dan UKM	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	60	70	90.000.000,00	75	150.000.000,00	80	180.000.000,00	90	200.000.000,00	100	250.000.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				90.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	60	70	90.000.000,00	75	150.000.000,00	80	180.000.000,00	90	200.000.000,00	100	250.000.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				420.000.000,00		435.000.000,00		450.000.000,00		465.000.000,00		480.000.000,00		
"Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	254	314	420.000.000,00	314	435.000.000,00	314	450.000.000,00	314	465.000.000,00	314	480.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				420.000.000,00		435.000.000,00		450.000.000,00		465.000.000,00		480.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	254	314	420.000.000,00	314	435.000.000,00	314	450.000.000,00	314	465.000.000,00	314	480.000.000,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				351.652.500,00		359.000.000,00		367.000.000,00		372.000.000,00		375.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	0	84	351.652.500,00	84,5	359.000.000,00	85	367.000.000,00	85,5	372.000.000,00	90	375.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100		100		100		100		100			
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	0	76		77		78		79		80			
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	58		62		66		70		74			
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	0	20,95		30,63		40,32		50		60			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				190.000.000,00		192.000.000,00		195.000.000,00		198.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	40	250	190.000.000,00	250	192.000.000,00	250	195.000.000,00	250	198.000.000,00	250	200.000.000,00		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				190.000.000,00		192.000.000,00		195.000.000,00		198.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	40	250	190.000.000,00	250	192.000.000,00	250	195.000.000,00	250	198.000.000,00	250	200.000.000,00		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				121.652.500,00		125.000.000,00		127.000.000,00		129.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	121.652.500,00	1	125.000.000,00	1	127.000.000,00	1	129.000.000,00	1	130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				121.652.500,00		125.000.000,00		127.000.000,00		129.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	121.652.500,00	1	125.000.000,00	1	127.000.000,00	1	129.000.000,00	1	130.000.000,00		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				40.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				40.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				342.240.000,00		445.000.000,00		550.000.000,00		655.000.000,00		810.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan tentang Pengobatan Paru dan Kusta (%)	0	89	342.240.000,00	89,5	445.000.000,00	90	550.000.000,00	90,5	655.000.000,00	91	810.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH	
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	2	32		48		64		80		96			
	Terlaksananya PHBS dalam rangka Promotif Preventif di UPTD Labkes Kab.Brebes (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				342.240.000,00		445.000.000,00		550.000.000,00		655.000.000,00		810.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	342.240.000,00	1	445.000.000,00	1	550.000.000,00	1	655.000.000,00	1	810.000.000,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				342.240.000,00		445.000.000,00		550.000.000,00		655.000.000,00		810.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	342.240.000,00	1	445.000.000,00	1	550.000.000,00	1	655.000.000,00	1	810.000.000,00		

LAMPIRAN 6. DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
Mewujudkan akses dan layanan kesehatan yang semakin berkualitas					Umur Harapan Hidup (RIBK)	Tahun	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
					Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	kondisi gagal tumbuh pada anak balita (anak di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah				Jumlah Kematian Ibu (RIBK)	Kasus	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan di Kabupaten Brebes				Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	Jumlah kematian anak berusia 0- 12bulan pada tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama
					Angka Kematian Balita	Per 1. 000 KH	1. Angka Kematian Balita (AKBa) adalah: Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Cakupan pelayanan kesehatan esensial Kab. Brebes	%	Cakupan pelayanan kesehatan essensial didefinisikan sebagai rata-rata cakupan pelayanan esensial yang mencakup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kapasitas dan akses pelayanan pada populasi umum dan populasi yang paling tidak beruntung. Indikator ini merupakan indeks berskala 0 sampai dengan 100 yang dihitung dari rerata geometrik 14 tracer indikator cakupan pelayanan kesehatan. Ke-14 tracer indikator tersebut adalah: A. Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan balita. 1. Keluarga berencana: persentase perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang pernah kawin atau hidup bersama kebutuhan keluarga berencana terpenuhi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Indikator SDG 3.7.1); 2. Perawatan kehamilan: persentase perempuan usia 15-49 tahun yang memiliki anak lahir hidup dalam periode waktu tertentu dan memperoleh pelayanan antenatal 4 kali atau 3. Imunisasi anak: persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheria□tetanus- 4. Perawatan balita: Persentase anak di bawah usia lima tahun yang diduga mengalami pneumonia (batuk dan sulit bernapas bukan karena permasalahan pada hidung dan dada) dalam kurun waktu dua minggu sebelum survei dan dibawa ke tenaga atau fasilitas kesehatan. B. Penyakit menular. 1. Tuberkulosis: Persentase insiden TB yang terdeteksi dan berhasil 2. HIV/AIDS: Persentase penduduk yang hidup dengan HIV dan saat ini mendapatkan terapi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							3. Malaria: persentase populasi di wilayah endemis malaria yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida pada malam sebelum 4. Air dan sanitasi: persentase Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi dasar. C. Penyakit tidak menular. 1. Hipertensi: Age-standardized Prevalensi pengobatan (mengkonsumsi obat) pada penduduk usia 30-79 tahun yang mengalami hipertensi (estimasi Age -standarized); 2. Diabetes: Age-standardized rata-rata gula darah puasa (mmol/L) pada penduduk usia 18 tahun dan lebih 3. Merokok: Age-standardized Prevalensi merokok pada penduduk usia >15 tahun yang menggunakan produk tembakau (merokok dan/ atau tidak merokok) setiap hari atau tidak setiap hari (indikator SDG 3.a.1). D. Kapasitas dan akses pelayanan. 1. Akses ke Rumah sakit: Tempat tidur rumah sakit per kapita, relatif terhadap ambang batas maksimum 18 per 10.000 2. Kepadatan tenaga kesehatan: tenaga kesehatan per kapita (dokter, psikiater, dan ahli bedah), relatif terhadap ambang batas maksimum untuk setiap kader (bagian dari indikator 3.c.1); 3. Keamanan kesehatan: indeks kapasitas utama regulasi kesehatan internasional (International Health Regulations/IHR) yang diperoleh dari 13 menjadi 15 indikator kapasitas yang dicapai (Indikator 3.d.1).

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Desa Siaga Aktif Mandiri	%	Desa/kelurahan yang memenuhi ketentuan dengan skor penilaian 32-36 yaitu yang sudah memiliki Forum Kesehatan Desa/ Kelurahan (FKD/FKK) dengan didukung surat keputusan yang sesuai, ada perencanaan dan pelaksanaan Survey Masyarakat Desa (SMD)/ Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang didukung dokumentasi, serta terdapat tindak lanjut dan evaluasi hasil SMD.
					Nilai SAKIP OPD	Angka	ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada suatu OPD, yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran.
					Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	Indeks	Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
DINAS KESEHATAN DAERAH							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan perangkat daerah	%	Indikator ini untuk mengukur kualitas pelayanan bagian umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah. Formulasinya : Rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan/sub kegiatan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, yang mencakup pengumpulan data, analisis kebutuhan, penetapan prioritas, penyusunan program dan kegiatan, serta penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Penyusunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang mencakup penjabaran rencana kerja (Renja) ke dalam rencana pembiayaan tahunan, berpedoman pada kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), serta ketentuan peraturan perundang-undangan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Penyusunan dan pengkoordinasian Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD), yang mencakup penjabaran rencana kerja (Renja) ke dalam rencana pembiayaan tahunan, berpedoman pada kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), serta ketentuan peraturan perundang-undangan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Verifikasi, dan koordinasi dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai tindak lanjut dari dokumen RKA-SKPD yang telah disetujui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Verifikasi, dan koordinasi dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) sebagai tindak lanjut dari dokumen RKA-SKPD yang telah disetujui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Koordinasi, menghimpun, dan menganalisis dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan perencanaan kinerja perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1. Walidata Pendukung adalah Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah 2. Walidata pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar data yang dilakukan disabled kepada walidata tingkat Daerah. 3. Walidata pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: Merekapitulasi data pada masing-masing bidang (Produsen Data) dalam perangkat daerah 4. Walidata pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa jumlah hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang (Produsen Data) untuk selanjutnya disampaikan kepada walidata tingkat daerah 5. Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1. Definsi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD. 2. Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah. 3. Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							4. Jenis Data SSD mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang di antaranya juga memuat Data Registrasi Sosial Ekonomi. 5. Tata cara pengumpulan dan pembaharuan data dilakukan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dari masing-masing walidata dengan berkoordinasi bersama Pembina Data.
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Penghitungan, penganggaran, pengelolaan, dan pembayaran gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan lainnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Menghimpun, memverifikasi, dan merekonsiliasi dalam laporan keuangan akhir tahun SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Menghimpun, merekapitulasi, dan memverifikasi dalam penyusunan laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulanan, dan semesteran) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan dasar evaluasi kinerja keuangan SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pendistribusian pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi ASN/pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung penampilan, identitas, disiplin, dan citra profesional aparatur pemerintah
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Kegiatan memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pegawai secara berkala, sebagai dasar pembinaan, pengembangan karier, pemberian penghargaan, maupun penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kegiatan menyampaikan, menjelaskan, dan mendiseminasikan informasi terkait peraturan perundang-undangan kepada ASN, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat, guna meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan/atau penggantian komponen instalasi listrik dan sistem penerangan pada bangunan kantor guna mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan kerja di lingkungan perangkat daerah
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, mendistribusikan, dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan peralatan rumah tangga kantor guna mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kelancaran operasional lingkungan kerja perangkat daerah
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan bahan logistik kantor yang bersifat habis pakai atau penunjang kegiatan administrasi dan operasional harian, guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, memproduksi, dan mendistribusikan barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen, formulir, buku, dan media cetak lainnya guna mendukung kelancaran administrasi, penyebarluasan informasi, serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan bahan bacaan berupa buku, jurnal, majalah, dan dokumen peraturan perundang-undangan guna mendukung peningkatan pengetahuan, kapasitas aparatur, serta pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbasis regulasi
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kegiatan memfasilitasi pertemuan, komunikasi, dan konsultasi antarpihak internal maupun eksternal guna menyamakan persepsi, membahas perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pendistribusian kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan mobilitas pejabat struktural maupun fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pendistribusian kendaraan dinas operasional atau lapangan oleh perangkat daerah guna menunjang kelancaran tugas-tugas teknis, mobilitas kegiatan pelayanan publik, serta pelaksanaan operasional harian instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan perabot/mebel kantor oleh perangkat daerah yang digunakan untuk mendukung kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin selain kategori utama (seperti komputer, kendaraan, dan mebel), yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya oleh perangkat daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, atau kegiatan operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan berbagai komponen sarana dan prasarana penunjang fungsi gedung kantor atau bangunan lainnya milik pemerintah daerah, untuk mendukung operasional kerja dan pelayanan publik, sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang berada di luar struktur utama gedung kantor atau bangunan lainnya, guna menunjang kelancaran operasional, keamanan, kenyamanan, serta estetika lingkungan kerja perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan jasa pengelolaan surat-menyurat, termasuk pengiriman dan penerimaan dokumen dinas secara fisik maupun elektronik, guna mendukung kelancaran komunikasi administrasi dan pelayanan tata usaha di lingkungan perangkat daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Perencanaan, penganggaran, dan pembayaran layanan komunikasi, pemanfaatan air bersih, serta penyediaan energi listrik untuk mendukung kelancaran operasional, administrasi, dan pelayanan di lingkungan perangkat daerah
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pengadaan jasa yang terkait dengan penggunaan, pemeliharaan, dan penyediaan peralatan serta perlengkapan kantor guna mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan operasional perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan jasa pendukung operasional rutin kantor, seperti kebersihan, keamanan, layanan parkir, dan jasa pendukung administrasi lainnya, guna menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, aman, dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Penganggaran, pengelolaan, dan pelaksanaan pembayaran jasa pemeliharaan rutin dan berkala, perbaikan, serta pelunasan pajak kendaraan dinas guna menjamin kelayakan operasional, keselamatan, dan kepatuhan administratif kendaraan tersebut
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, pembayaran pajak, serta pengurusan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan guna memastikan kendaraan selalu dalam kondisi laik jalan, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kegiatan menjaga, merawat, dan memperbaiki kondisi perabot atau peralatan mebel kantor, seperti meja, kursi, lemari, rak, dan sejenisnya, agar tetap berfungsi dengan baik, layak pakai, dan menunjang operasional pelayanan serta administrasi perkantoran
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kegiatan merawat, memperbaiki, dan menjaga fungsi peralatan dan mesin lainnya (selain kendaraan dan mebel) yang dimiliki atau digunakan oleh perangkat daerah, agar tetap berfungsi optimal, aman, dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan layanan perkantoran secara efektif

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kegiatan merawat, memperbaiki, atau merehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya milik pemerintah daerah agar tetap berfungsi optimal, aman, layak digunakan, serta memenuhi standar teknis dan estetika guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kegiatan menjaga, merawat, memperbaiki, atau merehabilitasi sarana dan prasarana penunjang gedung kantor atau bangunan lainnya agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung kelancaran operasional serta pelayanan perangkat daerah
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kegiatan menjaga, memperbaiki, atau merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung yang berada di sekitar atau terintegrasi dengan gedung kantor atau bangunan lainnya, guna memastikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, fungsional, serta mendukung kelancaran operasional perangkat daerah
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K6)	%	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal (ANC) sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas dengan minimal 6 kali kunjungan selama kehamilan
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Cakupan K4)	%	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal (ANC) sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas dengan minimal 4 kali kunjungan selama kehamilan
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi: 1) Persalinan normal. 2) Persalinan komplikasi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan (indikator SDGs)	%	perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar
					Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (indikator SDGs)	%	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Jumlah Kematian Bayi	Kasus	jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu
					Jumlah Kasus Kematian Balita (RIBK)	Kasus	Jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan pada tahun tertentu (termasuk kematian bayi)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Indikator SDGs)	%	Wasting adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/ 2010
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
					Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	Pelayanan kesehatan yang bertujuan mendeteksi dini masalah kesehatan jiwa dan NAPZA agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin sesuai standar, serta tersedianya data atau informasi untuk menilai perkembangan kesehatan masyarakat yang beresiko
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (RIBK)	%	Jumlah Penderita Depresi pada usia ≥ 15 yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	%	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-21 tahun. Definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang. Data diperoleh dari data CKG

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	%	Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
					Presentase Orang Penderita Penyakit menular dan tidak menular Mendapatkan Pelayanan Sesuai standar	%	Pelayanan Kesehatan penderita Penyakit Menular dan Tidak menular, adalah Pelayanan Kesehatan pada semua penduduk terhadap penyakit-penyakit menular yang berpotensi KLB/Wabah, penyakit tular Vektor dan Zoonosis (P2PTVZ), serta penyakit Tropis terabaikan (NTD's) (P2ISPA/Pneumonia, DB, Hepatitis, Sipilis, Kusta, frambusia, leptospirosis, rabies)
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate/TSR) (RIBK)	%	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
					Cakupan penemuan kasus TB (Treatment Coverage) (RIBK)	%	Persentase penderita TB yang berhasil ditemukan dan didiagnosis dari total perkiraan penderita TB di suatu wilayah
					Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar	%	pelayanan kesehatan sesuai dengan standar berupa pengobatan kepada orang yang sudah terkonfirmasi HIV
					Presentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan suspect Malaria sesuai standar	%	pemeriksaan fisik dan tes diagnostik instan, serta pemberian obat yang sesuai untuk mendeteksi gejala dan parasit penyebab malaria

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Angka penemuan kasus baru Kusta per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode tertentu per 100.000 penduduk
					Cakupan Penemuan kasus pneumonia pada Balita (pelayanan kesehatan esensial)	%	Prosentase kasus pneumonia balita yg ditemukan di wilayah kerja puskesmas diseluruh kabupaten dalam kurun waktu satu tahun
					Cakupan imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 Bulan (IDL) (RIBK)	%	anak usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap yaitu 1 dosis HB0, 1 dosis BCG, 3 dosis DPTHBHib, 4 dosis Polio tetes (OPV), 1 dosis Polio suntik (IPV), dan 1 dosis MR
					Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan (indikator SDGs)	%	anak usia 12-23 bulan (baduta) yang telah mendapatkan imunisasi DPTHBHib dan MR 2
					Persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheri tetanus (3 dosis DPT) (Indikator Pelayanan Kesehatan Esensial)	%	anak usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan imunisasi 3 dosis DPT
					Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	Proporsi Puskesmas yang memiliki : 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmas
					cakupan puskesmas yang melayani kesehatan pasca bencana, Wabah dan KLB	%	persentase puskesmas yg melakukan pelayanan kesehatan kurang dari 24 jam setelah terjadi bencana,wabah, KLB
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (RIBK)	%	Persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama yang diperoleh dari data CKG
					Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (RIBK)	%	Persentase desa/ kelurahan yang telah terverifikasi 100 % KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di Tempat terbuka dan minimal 75 % KK berperilaku minimal 3 Pilar STBM lainnya
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat (RIBK)	%	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat pengelolaan pangan meliputi : hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) 80, peningkatan kapasitas penjamah pangan dan pemeriksaan pangan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Puskesmas yang menyelenggarakan KKS	unit	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (ada SK Forum Kecamatan, SK Pokja Desa, Sekretariat, Rencana Kegiatan anggaran untuk kegiatan tatanan)
					Persentase puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	Persentase puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat 70% di sarana air minum, 30% rumah tangga, 70% TPP memenuhi syarat, kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat 70% di TFU dan 30% di pemukiman serta menyelenggarakan KKS (ada SK Forum Kecamatan, SK Pokja Desa sekretariat, rencana kegiatan, anggaran untuk kegiatan tatanan)
					Persentase puskesmas yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara	%	Jumlah puskesmas yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat 70% di Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan 30% di permukiman
					Persentase puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) Memenuhi Syarat	%	Puskesmas dengan 30% TFU prioritas meliputi sekolah, pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan akomodasi yang memenuhi syarat Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)/ uji kualitas kesehatan lingkungan
					Persentase puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	Puskesmas dengan kualitas air minum memenuhi syarat (e.coli dan 4 parameter kimia tertentu) 70% di sarana air minum, 30% di rumah tangga. Sarana air minum yang diperiksa : PDAM, KPSPAM, Bumdes dengan SK. Air minum rumah tangga adalah rumah tangga yang menjadi sampel lokus puskesmas
					Persentase puskesmas yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan	%	Puskesmas yang memfasilitasi desa/ kelurahan sehat iklim di masing-masing wilayah kerjanya (desa/ keluarahan sehat iklim adalah memiliki Tim Kerja Masyarakat (TKM), Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dan ada intervensi)
					Fasyankes (RS dan puskesmas) memenuhi layanan kesling kunci	unit	Jumlah Fasyankes (RS dan puskesmas) memenuhi layanan air, sanitasi, kelola limbah, higiene, dan kebersihan sesuai standar peraturan yang berlaku

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	%	Persentase jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentu
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (RIBK)	%	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk
					Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) (SDG's)	%	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (RIBK)	%	Persentase peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan status keanggotaannya sah serta tidak memiliki tunggakan iuran yang menyebabkan status dinonaktifkan
					Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	Persentase fasilitas kesehatan (Puskesmas termasuk labkesmas, RS) yang secara konsisten mempertahankan tingkat kecukupan pasokan kesehatan esensial, termasuk diagnostik, reagen, obat-obatan, vaksin, sesuai dengan pedoman untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (RIBK)	%	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes,TPMD/DG yang terkoneksi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit populasi: total seluruh faskes (tanpa apotek)
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	Persentase pustu, puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar sarana, prasarana, alat kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (RIBK)	%	Persentase fasilitas kesehatan dengan akreditasi paripurna, dimana sasaran obyek fasyankes yang dimaksud adalah : RS pemerintah dan swasta, puskesmas, labkesda, lab medis, klinik pratama, klinik utama dan UTD
					Persentase posyandu aktif siklus hidup (RIBK)	%	Persentase posyandu yang telah melaksanakan Integrasi Layanan Primer dibandingkan jumlah total posyandu yang ada di Kabupaten Brebes

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Persentase lanjut usia yang mandiri (RIBK)	%	Persentase lansia ≥60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri : skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (skor ADL 12-19/ketergantungan ringan)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan / non kesehatan kepada ibu sejak masa konsepsi hingga melahirkan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir adalah setiap kegiatan/rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7, dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir. Bayi baru lahir adalah bayi lahir hidup yang berusia 0 – 28 hari

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat pelayanan kesehatan standar	Orang	Pelayanan Kesehatan balita adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan oleh tenaga kesehatan/non kesehatan kepada balita pada fasilitas pelayanan kesehatan Balita adalah adalah anak umur 0 bulan sampai dengan 59 bulan Jenis Belanja untuk jenis pelayanan dasar SPM kesehatan mengikuti Permenkes No 4 Tahun 2019
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayan kesehatan Standar	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah upaya pelayanan kesehatan melipuit upaya promotif, preventif dan kuratif sesuai standar yang diberikan kepada kelompok usia pendidikan dasar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, peventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar yang diberikan kepada kelompok usia 60 tahun ke atas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar usia	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan upaya promotif, preventif (deteksi dini penyakit dan lain-lain), kuratif dan rehabilitatif, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif Usia Produktif adalah orang yang berusia 15 tahun sampai dengan usia 59 tahun.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus. Penderita Diabetes Melitus adalah orang yang di dignosa Diabetes Melitus oleh dokter atau petugas kesehatan yang diberikan kewenangan untuk menegakkan diagnosa.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar Penderita Hipertensi adalah orang yang di dignosa Hipertensi oleh dokter atau petugas kesehatan yang diberi kewenangan untuk menegakkan diagnosa.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat adalah upaya pelayanan kesehatan meliputi promotive, preventif , kuratif dan rehabilitative sesuai standar yang diberikan kepada penderita gangguan jiwa berat Orang Dengan Gangguan Jiwa disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA adalah pengelolaan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA. NAPZA adalah akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif zat psikoaktif yang bekerja pada susunan saraf pusat secara selektif sehingga dapat menimbulkan perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, persepsi maupun kesadaran. Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum dan membahayakan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA adalah pengelolaan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA. Pecandu NAPZA adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA, baik secara fisik maupun psikis. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA adalah pengelolaan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban gangguan penggunaan NAPZA dari ketergantungan NAPZA.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa adalah upaya pelayanan kesehatan meliputi promotive, preventif , kuratif dan rehabilitative sesuai standar yang diberikan kepada orang dengan masalah kesehatan jiwa Orang Dengan Masalah Kejiwaan disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
				Pengelolaan Kawasan tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok adalah upaya pencegahan konsumsi merokok melalui penetapan kawasan tanpa rokok yang meliputi kegiatan: a. melakukan penyusunan penetapan kebijakan kawasan tanpa rokok di wilayah Kabupaten/Kota, kelurahan/desa, Dusun, RW/RT ; b. menyusun rencana aksi implementasi kebijakan kawasan tanpa c. melaksanakan rencana aksi implementasi kawasan tanpa dan d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi Mekanisme Pelayanan : 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan berisikodan skrining pada kondisi situasi khusus 3) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda 4) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis 5) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 6) Melakukan rujukan jika diperlukan Jenis Belanja untuk jenis pelayanan dasar SPM kesehatan mengikuti Permenkes No 4 Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Skrining orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia adalah pemeriksaan HIV terhadap populasi berisiko agar orang tersebut dapat mengetahui status terinfeksi HIV nya secara dini.
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	Pengelolaan imunisasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap fasyankes untuk memastikan bahwa cakupan imunisasi tinggi dan merata. Kegiatan pelayanan imunisasi dapat digunakan untuk pemberian imunisasi bayi, baduta, WUS, antigen baru, COVID-19, BIAS, dan Outbreak Response Immunization (ORI) pada daerah-daerah yang mengalami KLB PD3I, selain itu juga untuk kegiatan imunisasi kejar/pelacakan/sweeping/ DOFU/BLF/imunisasi tambahan lainnya, Sustainability Outreach Services (Pelayanan Imunisasi di Daerah Sulit).
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular adalah upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular beserta faktor risikonya. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi pencegahan termasuk perlindungan spesifik melalui imunisasi maupun profilaksis, deteksi dini dan respons.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit. Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis)
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis	Jumlah orang dengan tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis adalah Setiap orang dengan Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi 4) Pengobatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV adalah Setiap orang dengan HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi 4) Pengobatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan suspect Malaria yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	Semua Belanja pengadaan/penyediaan/ pelaksanaan: BMHP, Obat, Alat, Biaya Operasional untuk melaksanakan promosi, pencegahan, melayani orang dengan Malaria (sejak berisiko sampai didiagnosa dan selama masih menderita Malaria); sejak pendataan/ surveilance, pelaksanaan pemeriksaan fisik dan laboratorium, sampai dengan dialokasikan pada Sub-Kegiatan ini

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Surveilans adalah kegiatan yang di mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan interpretasi yang menjadi satu informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan. Surveilans Kesehatan Lingkungan merupakan salah satu sasaran dari penyelenggaraan, Surveilans Kesehatan. Salah satu surveilans kesehatan lingkungan adalah Surveilans kualitas Air Minum. Surveilans kualitas air minum dilaksanakan sebagai kegiatan rutin pengawasan di seluruh kabupaten/kota, baik oleh internal maupun eksternal, sebagai bagian dari pemantauan dampak kesehatan masyarakat dan perbaikan sistem penyediaan Air Minum serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk peduli mendapatkan kualitas air yang aman
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	Pelayanan kesehatan bagi setiaporang yang terdiagnosis penyakit penyebab KLB dan orang yang berisiko (orang yang mempunyai risiko tertular penyakit penyebab KLB) pada situasi KLB (Kriteria KLB sesuai dengan PMK No 1501 tahun 2010) sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB Adapun pelaksanaan layanan kesehatan pada situasi KLB adalah: a) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							b) Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan c) Komunikasi risiko/Penyuluhan d) Pencegahan penularan dan pengebalan/peningkatan imunitas sesuai dengan jenis penyakit e) Penanganan jenazah, jika diperlukan f) Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan g) Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana sesuai standar	Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana adalah upaya pengelolaan krisis kesehatan di kabupaten/kota melalui kegiatan sebagai berikut: a. Pada saat Pra Krisis Kesehatan berupa edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana di kabupaten/ b. Pada Saat Tanggap Darurat Krisis Kesehatan berupa pelayanan kesehatan di kabupaten/kota yang ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan yang meliputi : a) Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan. b) Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan. c) Mendapatkan layanan gizi d) Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							e) Mendapatkan layann dukungan kesatan jiwa dan f) Mendapatkan edukasi kesehatan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan adalah penduduk yang mendapatkan akibat/dampak krisis kesehatan suatu bencana yang terdiri darierdampak itu jumlah korban (meniggal,luka ringan, luka berat) ditambah pengungsi ditambah penduduk yang tidak menjadi korban dan tidak mengungsi tapi ikut terdampak dari bencana tersebut. Permenkes No 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Kewaspadaan Dini Wabah adalah keawspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dg cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap perkembangan penyakit berpotensi KLB agar dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB Respon wabah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan kejadian dan timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu kejadian luar biasa yang sedang terjadi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga adalah upaya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pada Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga yang diberikan kepada institusi maupun kelompok masyarakat Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Lingkungan	Dokumen	Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyakit
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	penyelenggaraan kab/kota sehat adalah jumlah kab/kota yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK Tim Pembina, memiliki SK Forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) adalah penyediaan dan pengelolaan Public Safety center (PSC 119) yang terintegrasi dengan Rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Permenkes no 19 tahun 2016 ttg Sistem Penanggulanagan Gawat Darurat Terpadu Permenkes No 47 tahun 2018 ttg Pelayanan Kegawatdaruratan, Kepdirjen Yankes No HK.02.02/I/1791/2021 tantang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Public Safety Center (PSC) 119 Pelayanan Kegawatdaruratan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah. Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan persiapan, pendampingan, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan survei akreditasi atau survei re-akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan) oleh lembaga akreditasi sehingga fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh sertifikat akreditasi.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah penyediaan Pelayanan konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui Pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses Pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peraturan Presiden (PERPRES) No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Operasional Pelayanan Puskesmas adalah segala kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan manajemen bisnis Puskesmas dalam pengelolaan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah segala kegiatan yang dilakukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan manajemen bisnis Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Fasilitas Kesehatan Lainnya dalam hal ini dapat berupa laboratorium kesehatan daerah, instalasi farmasi, Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan,Unit Tranfusi Darah, dan pelayanan kesehatan tradisional.
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	Pemeliharaan Rutin dan Berkala adalah pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun. Pemeliharaan Berkala adalah pemeliharaan yang dilaksanakan secara periodik berkala pada jangka waktu tertentu dalam satu tahun. Alat Kesehatan Fasilitas Layanan Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah adalah
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan adalah pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjalankan fungsinya sesuai standar dan memberikan layanan unggulan.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Paket	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi adalah penyediaan dan pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center. Alat kalibrasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur, menguji, dan mengoreksi keluaran alat/mesin/instalasi tertentu dibandingkan dengan standar dan proses koreksi akurasi hasil keluaran alat tertentu tadi menjadi sesuai standar.
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Makanan dan Minuman adalah bahan makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai standar dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara dan memperbaiki status gizi Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan Habis Pakai adalah reagen dan atau alat pendukung Utama lainnya yang ditujukan untuk penggunakan sekali pakai dalam pengujian parameter yang diatur dalam peraturan perundang undangan Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yg ditambahkan dengan zat lainnya, yg bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya adalah pembangunan rumah sakit baru beserta sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan atau pemenuhan akses pemenuhan pelayanan rujukan. Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	Pengembangan Puskesmas adalah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM sesuai standar jenis pelayanan Puskesmas yang akan dikembangkan. Sarana yang dimaksud adalah lokasi dan lahan, bangunan, prasarana serta peralatan. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu sarana dapat berfungsi. Kriteria sesuai standar adalah terpenuhinya persentase sarana dan prasarana alat kesehatan di atas 60% serta SDM sesuai jenis pelayanan Puskesmas

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah pengembangan Fasilitas kesehatan berupa Laboratorium Kesehatan Daerah, Instalasi Kefarmasian, Unit Tranfusi Darah dan Fasilitas Kesehatan Tradisional, yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	Rehabilitasi Puskesmas adalah memperbaiki bangunan Puskesmas yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap atau tidak berubah. Pemeliharaan Puskesmas adalah suatu kegiatan untuk melakukan pengelolaan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas secara promotif, inspektif, preventif, dan korektif agar tetap berfungsi. Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas adalah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar. Permenkes no.43 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	Rehabilitasi fasilitas kesehatan lainnya adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap atau tidak berubah. Pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya adalah suatu kegiatan untuk melakukan pengelolaan bangunan dan prasarana secara promotif, inspektif, preventif, dan korektif agar tetap berfungsi.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya adalah rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan berupa Laboratorium Kesehatan Daerah, Instalasi Farmasi, Unit Tranfusi Darah dan Fasilitas Kesehatan Tradisional yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	Pendekatan keluarga adalah pelaksanaan kunjungan keluarga oleh tenaga kesehatan puskesmas bersama kader dan intervensi masalah kesehatan dasar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Permenkes No 39 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DOkumen	Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah semua persiapan, perencanaan dalam penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan baik upaya kesehatan yang bersifat perseorangan maupun masyarakat. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	Pengawasan terhadap perizinan berusaha dilakukan terhadap pemenuhan standar dan kewajiban rumah sakit dalam bentuk pengawasan rutin dan pengawasan insidental ang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat melibatkan Pemerintahkan Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau oragnisasi profesi atau asosiasi perimahsakitan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah hasil laporan terhadap pemenuhan perizinan rumah sakit dan standar mutu pelayanan rumah sakit

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah peningkatan penataan dan pengelolaan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota mengacu pada standar elemen penilaian pengelolaan. Standar adalah menggunakan Elemen Penilaian: 1) Tata kelola: terkait kewenangan, struktur, akuntabilitas, pengawasan profesional, laporan KTD ; 2) Manajemen risiko: kewenangan, struktur, analisis, cakupan manajemen resiko, indikator ; 3) Kepatuhan -Ketaatan : Kewenangan, Struktur, Pengawasan, Kepedulian. - UU 44 Tahun 2009 Tentang RS - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi RS. - Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RS - Kepmenkes 772 / 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan adalah pengukuran fasilitas pelayanan kesehatan dengan Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasen (IKP). Mutu Pelayanan Kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (RIBK)	%	Persentase Puskesmas terintegrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non perkataan) untuk RPJMN 2025-2029 Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar : a. Puskesmas Non Rawat Inap : minimal terdapat masing2 1 dokter yang memiliki kompetensi dibidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisionis, sanitasi lingkingan/tenaga kesmas/tenaga system informasi kes/perekamedis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan b. Puskesmas Rawat Inap Wilayah Perkotaan : minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi dibidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, perawat dan bidan, serta minimal terdapat 1 dokter gigi , apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium, medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkingan, tersapis gigi dan mulut , tenaga system informasi kes/perekamedis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							c. Puskesmas Rawat Inap Wilayah Non Perkotaan : minimal terdapat 2 dokter yang memiliki kompetensi dibidang kedokteran keluarga layanan primer/dokter, perawat dan bidan, serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi dan mulut, apoteker/ tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promodsi kesehatan, dan ilmu perilaku/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkingan/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga system informasi kes/perekamedis, tenaga administrasi keuangan/ ketatausahaan
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (RIBK)	per 1.000 penduduk	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang tersedia terhadap jumlah penduduk
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (RIBK)	%	Persentase RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah terintegrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A,Sp.B,Sp.OG,Sp.PD, Sp.An,Sp.Rad,Sp.PK)
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota				
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan adalah jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh surat izin praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan (tenaga non kesehatan) yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan adalah upaya untuk mengisi kebutuhan sumberdaya manusia sesuai dengan perhitungan kebutuhan melalui perekrutan baru SDM Kesehatan.
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	Peningkatan Kompetensi SDMK adalah upaya yang meliputi ujian kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kesehatan Peningkatan Kualifikasi SDMK adalah upaya yang meliputi Pendidikan sumber daya manusia Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kesehatan Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: a. tenaga medis (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis); b. tenaga psikologi c. tenaga Keperawatan d. tenaga Kebidanan e. tenaga kefarmasian(Apoteker, Tenaga Teknis Kepfarmasian);

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							f. tenaga kesehatan masyarakat (Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenagan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Biostatistik dan Kependudukan, Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga); g. tenaga kesehatan lingkungan (Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan); h. tenaga gizi (Nutrisionis dan Dietisien); i. tenaga keterapian fisik (fisioterafis, Okupasi Terafis, Terafis Wicara, Akupuntur) ; i. tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi Kesehatan, Teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, audiologis); k. tenaga teknik biomedika (radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, ortotik prostetik); l. tenaga kesehatan tradisional (tenaga Kesehatan tradisional ramuan, tenaga Kesehatan tradisional keterampilan); dan m. tenaga kesehatan lain (ditetapkan oleh Menteri). PP no 67 tahun 2019 tentang tata kelola nakes, Undang-undang Nakes No 36 tahun 2014, Undang-undang kesehatan No 36 Tahun 2009,

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, dan MAKANAN MINUMAN			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (RIBK)	**%**	• Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis • Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT. Sesuai standar adalah kesesuaian penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT dengan persyaratan minimal yang ditetapkan, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 4Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT. Persyaratan minimal yang ditetapkan, yaitu: - Kesesuaian produk yang memperoleh SPP-IRT yang dibuktikan melalui konfirmasi produk pada aplikasi SPPIRT. - Adanya pemenuhan komitmen SPP-IRT yang dibuktikan dengan verifikasi pemenuhan komitmen pada aplikasi sppirt.pom.go.id yang meliputi pemenuhan komitmen terhadap Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), CPPB-IRT, dan label. • Pengampu indikator Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BPOM sebagai koordinator.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (RIBK)	%	1. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. 2. Sampling dilakukan di sarana peredaran pangan meliputi gudang distributor, hypermarket, supermarket/swalayan, toko, warung, kantin sekolah dan kantin/warung/toko di sekitar sekolah, kios, pasar tradisional, apotek, toko obat, dan lain-lain 3. Sampling dan pengujian PIRT dapat dilakukan terhadap jenis pangan olahan PIRT terdaftar yang diproduksi dalam wilayah kabupaten/kota atau dari luar kabupaten/kota namun beredar dalam wilayah kabupaten/kota tersebut 4. Sampling dan pengujian PIRT juga dapat dilakukan di sarana produksi dan/atau peredaran, apabila terdapat perkembangan isu keamanan pangan. a. Potensi/kasus pelanggaran/masalah pangan. b. Pengaduan masyarakat. c. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). d. Emerging issue yang perlu ditindaklanjuti sebagai dasar kebijakan. e. Tujuan lain yang dianggap perlu berdasarkan hasil kajian risiko.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							5. Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap: a. Nomor SPP-IRT b. Produk kedaluwarsa c. Produk rusak d. Penandaan produk e. Pengujian produk. 6. Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 5.a hingga poin 5.e. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 5.a akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 5.b dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.c (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria5.d
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (RIBK)	**%**	• Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis. • IRTP Memenuhi Ketentuan (MK) adalah IRTP yang memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPOB IRTP) pada saat pemeriksaan oleh PemdaKab/Kota.
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (RIBK)	**%**	• Sarana apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan adalah sarana yang berhasil memenuhi dan mempertahankan persyaratan perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. • Memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan Permenkes yang terkait dengan perizinan berusaha apotek dan toko obat • Jangka waktu tertentu adalah batasan waktu dari sarana yang menjadi target diperiksa yaitu sarana yang izinnya diterbitkan antara 1 s.d 2 Tahun dan atau 45 Tahun

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (RIBK)	**%**	• Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. • Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan • Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah rekomendasi dari lintas sektor berupa tindak lanjut dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan • Lintas sektor : - Sediaan farmasi meliputi Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, dan Kementerian Perdagangan - Pangan Olahan meliputi BPOM dan Pemda lainnya • Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota • Jumlah rekomendasi hasil pengawasan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan dari lintas sektor yang diterima pada tahun berjalan Jumlah yang ditindaklanjuti adalah Jumlah tindaklanjut dari rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yg tlh diterbitkan pd thn berjalan
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran Toko Alat Kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan Alat Kesehatan secara eceran Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang hanya memproduksi sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Pengendalian dan pengawasan adalah pendataan (penyediaan dan pengolahan data), pembinaan dan pengawasan.
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Dokumen	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap Pangan olahan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan penerbitan SPP-IRT dalam rangka peredaran P-IRT. Pengendalian dan pengawasan merupakan serangkaian proses pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dari pelaku usaha yang diberi waktu 3-6 bulan berupa penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan, pemeriksaan sarana IRTP dan pemeriksaan terhadap label dan iklan pangan. Tindak lanjut pengawasan merupakan serangkaian proses berupa kaji ulang SPP-IRT yang terbit dan sosialisasi SPP-IRT terhadap pelaku usaha
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial seperti jasa boga/katering, rumah makan/restoran, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, sentra gerai pangan jajanan/kantin, dapur gerai pangan jajanan, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji. Jenis TPP wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah Jasaboga/Katering, Restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum Jasa boga/katering adalah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan tidak melayani makan di tempat usaha (dine in). Restoran adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di dalam tempat usaha/melayani makan di tempat (dine in) serta melayani pesanan di luar tempat usaha. TPP Tertentu adalah TPP yang produknya memiliki umur simpan satu sampai kurang dari tujuh hari pada suhu ruang. Depot Air Minum yang selanjutnya disebut DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**%**	**Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan kemauan masyarakat agar mampu mengatasi masalah kesehatan sendiri**
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	Promosi Kesehatan adalah kegiatan atau upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui advokasi kesehatan, penggalangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat di berbagai tatanan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dan pelaksanan Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan. Upaya Advokasi Kesehatan tingkat kabupaten adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambil keputusan ditingkat kabupaten untuk membuat kebijakan publik yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan kelompok masyarakat dan lintas sektor tingkat kabupaten/kota agar dapat secara mandiri dalam memikirkan, memutuskan dan melakukan sesuatu yang tepat untuk memecahkan masalah kesehatan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki
LABKESDA							

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			**Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah**	**Indeks**	**Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Penghitungan, penganggaran, pengelolaan, dan pembayaran gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan lainnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Kegiatan memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pegawai secara berkala, sebagai dasar pembinaan, pengembangan karier, pemberian penghargaan, maupun penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan/atau penggantian komponen instalasi listrik dan sistem penerangan pada bangunan kantor guna mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan kerja di lingkungan perangkat daerah
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, mendistribusikan, dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan peralatan rumah tangga kantor guna mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kelancaran operasional lingkungan kerja perangkat daerah
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan bahan logistik kantor yang bersifat habis pakai atau penunjang kegiatan administrasi dan operasional harian, guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, memproduksi, dan mendistribusikan barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen, formulir, buku, dan media cetak lainnya guna mendukung kelancaran administrasi, penyebarluasan informasi, serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan bahan bacaan berupa buku, jurnal, majalah, dan dokumen peraturan perundang-undangan guna mendukung peningkatan pengetahuan, kapasitas aparatur, serta pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbasis regulasi
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kegiatan memfasilitasi pertemuan, komunikasi, dan konsultasi antarpihak internal maupun eksternal guna menyamakan persepsi, membahas perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan perabot/mebel kantor oleh perangkat daerah yang digunakan untuk mendukung kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya oleh perangkat daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, atau kegiatan operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang berada di luar struktur utama gedung kantor atau bangunan lainnya, guna menunjang kelancaran operasional, keamanan, kenyamanan, serta estetika lingkungan kerja perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Perencanaan, penganggaran, dan pembayaran layanan komunikasi, pemanfaatan air bersih, serta penyediaan energi listrik untuk mendukung kelancaran operasional, administrasi, dan pelayanan di lingkungan perangkat daerah
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan jasa pendukung operasional rutin kantor, seperti kebersihan, keamanan, layanan parkir, dan jasa pendukung administrasi lainnya, guna menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, aman, dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, pembayaran pajak, serta pengurusan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan guna memastikan kendaraan selalu dalam kondisi laik jalan, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kegiatan menjaga, merawat, dan memperbaiki kondisi perabot atau peralatan mebel kantor, seperti meja, kursi, lemari, rak, dan sejenisnya, agar tetap berfungsi dengan baik, layak pakai, dan menunjang operasional pelayanan serta administrasi perkantoran
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kegiatan merawat, memperbaiki, dan menjaga fungsi peralatan dan mesin lainnya (selain kendaraan dan mebel) yang dimiliki atau digunakan oleh perangkat daerah, agar tetap berfungsi optimal, aman, dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan layanan perkantoran secara efektif
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kegiatan merawat, memperbaiki, atau merehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya milik pemerintah daerah agar tetap berfungsi optimal, aman, layak digunakan, serta memenuhi standar teknis dan estetika guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**Tersedianya Pelayanan Laboratorium untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah di Kabupaten Brebes**	%	Tersedianya pelayanan yang mencakup pemeriksaan laboratorium yang berfungsi untuk mendukung Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), yang menjadi kewenangan di UPTD Labkesda

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Dokumen	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular adalah upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular beserta faktor risikonya. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi pencegahan termasuk perlindungan spesifik melalui imunisasi maupun profilaksis, deteksi dini dan respons. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit. Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis)
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Unit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan persiapan, pendampingan, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan survei akreditasi atau survei re-akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan) oleh lembaga akreditasi sehingga fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh sertifikat akreditasi.
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Unit	Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan adalah pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjalankan fungsinya sesuai standar dan memberikan layanan unggulan.
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Paket	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi adalah penyediaan dan pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center. Alat kalibrasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur, menguji, dan mengoreksi keluaran alat/mesin/instalasi tertentu dibandingkan dengan standar dan proses koreksi akurasi hasil keluaran alat tertentu tadi menjadi sesuai standar.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Paket	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Makanan dan Minuman adalah bahan makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai standar dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara dan memperbaiki status gizi Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan Habis Pakai adalah reagen dan atau alat pendukung Utama lainnya yang ditujukan untuk penggunakan sekali pakai dalam pengujian parameter yang diatur dalam peraturan perundang undangan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif thp penyakit tertentu
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Dokumen	Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA			**PresentaseTenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di Laboratorium Kesehatan Daerah**	**%**	**terlaksananya kegiatan pelatihan dan uji kompetensi jabfung kes**
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	Peningkatan Kompetensi SDMK adalah upaya yang meliputi ujian kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kesehatan Peningkatan Kualifikasi SDMK adalah upaya yang meliputi Pendidikan sumber daya manusia Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kesehatan Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: a. tenaga medis (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis); b. tenaga psikologi c. tenaga Keperawatan d. tenaga Kebidanan e. tenaga kefarmasian(Apoteker, Tenaga Teknis Kepfarmasian); f. tenaga kesehatan masyarakat (Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenagan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Biostatistik dan Kependudukan, Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga); g. tenaga kesehatan lingkungan (Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan); h. tenaga gizi (Nutrisionis dan Dietisien); i. tenaga keterapian fisik (fisioterafis, Okupasi Terafis, Terafis Wicara, Akupuntur) ; i. tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi Kesehatan, Teknik

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							j. tenaga teknik biomedika (radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, ortotik prostetik); k. tenaga kesehatan tradisional (tenaga Kesehatan tradisional ramuan, tenaga Kesehatan tradisional keterampilan); dan l. tenaga kesehatan lain (ditetapkan oleh Menteri). PP no 67 tahun 2019 tentang tata kelola nakes, Undang-undang Nakes No 36 tahun 2014, Undang-undang kesehatan No 36 Tahun 2009,
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**Terlaksananya PHBS dalam rangka promotif preventif di UPTD Labkesda**	%	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Bentuk promosinya berupa: iklan di radio, dialog interaktif, dan spanduk/poster
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Dokumen	Promosi Kesehatan adalah kegiatan atau upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui advokasi kesehatan, penggalangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat di berbagai tatanan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dan pelaksanan Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan. Upaya Advokasi Kesehatan tingkat kabupaten adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambil keputusan ditingkat kabupaten untuk membuat kebijakan publik yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan kelompok masyarakat dan lintas sektor tingkat kabupaten/kota agar dapat secara mandiri dalam memikirkan, memutuskan dan melakukan sesuatu yang tepat untuk memecahkan masalah kesehatan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki
KP2K							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Balai Pengobatan Paru dan Kusta**	**Indeks**	**Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan/atau penggantian komponen instalasi listrik dan sistem penerangan pada bangunan kantor guna mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan kerja di lingkungan perangkat daerah
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, mendistribusikan, dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan peralatan rumah tangga kantor guna mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kelancaran operasional lingkungan kerja perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, mengadakan, dan mendistribusikan bahan logistik kantor yang bersifat habis pakai atau penunjang kegiatan administrasi dan operasional harian, guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kegiatan merencanakan, menganggarkan, memproduksi, dan mendistribusikan barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen, formulir, buku, dan media cetak lainnya guna mendukung kelancaran administrasi, penyebarluasan informasi, serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kegiatan memfasilitasi pertemuan, komunikasi, dan konsultasi antarpihak internal maupun eksternal guna menyamakan persepsi, membahas perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan perabot/mebel kantor oleh perangkat daerah yang digunakan untuk mendukung kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Perencanaan, penganggaran, dan pembayaran layanan komunikasi, pemanfaatan air bersih, serta penyediaan energi listrik untuk mendukung kelancaran operasional, administrasi, dan pelayanan di lingkungan perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan jasa pendukung operasional rutin kantor, seperti kebersihan, keamanan, layanan parkir, dan jasa pendukung administrasi lainnya, guna menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, aman, dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, pembayaran pajak, serta pengurusan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan guna memastikan kendaraan selalu dalam kondisi laik jalan, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kegiatan merawat, memperbaiki, dan menjaga fungsi peralatan dan mesin lainnya (selain kendaraan dan mebel) yang dimiliki atau digunakan oleh perangkat daerah, agar tetap berfungsi optimal, aman, dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan layanan perkantoran secara efektif
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kegiatan merawat, memperbaiki, atau merehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya milik pemerintah daerah agar tetap berfungsi optimal, aman, layak digunakan, serta memenuhi standar teknis dan estetika guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**Tersedianya Pelayanan Pengobatan Paru dan Kusta untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah di Kabupaten Brebes**	**%**	**Tersedianya pelayanan yang mencakup pemeriksaan Paru dan Kusta yang berfungsi untuk mendukung Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), yang menjadi kewenangan di UPTD KP2K**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	Unit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan persiapan, pendampingan, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan survei akreditasi atau survei re-akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan) oleh lembaga akreditasi sehingga fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh sertifikat akreditasi. Permenkes 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan adalah pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjalankan fungsinya sesuai standar dan memberikan layanan unggulan.
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	Paket	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Makanan dan Minuman adalah bahan makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai standar dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara dan memperbaiki status gizi Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DOkumen	Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA			**PresentaseTenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA**	**%**	**terlaksananya kegiatan pelatihan dan uji kompetensi jabfung kes**
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	Peningkatan Kompetensi SDMK adalah upaya yang meliputi ujian kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kesehatan Peningkatan Kualifikasi SDMK adalah upaya yang meliputi Pendidikan sumber daya manusia Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kesehatan Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan Tenaga Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**Terselenggaranya Program Promosi Kesehatan tentang Pengobatan Paru dan Kusta**	**%**	**Merupakan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota. Adapun rincian indikator berupa pengadaan bendera dan jasa siaran radio promosi**
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Balai PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	Dokumen	Promosi Kesehatan adalah kegiatan atau upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui advokasi kesehatan, penggalangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat di berbagai tatanan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dan pelaksanan Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan. Upaya Advokasi Kesehatan tingkat kabupaten adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambil keputusan ditingkat kabupaten untuk membuat kebijakan publik yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
							Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan kelompok masyarakat dan lintas sektor tingkat kabupaten/kota agar dapat secara mandiri dalam memikirkan, memutuskan dan melakukan sesuatu yang tepat untuk memecahkan masalah kesehatan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki
RSUD							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Brebes	Indeks	
					Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan	Indeks	
					Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Bumiayu	Indeks	
			Peningkatan Pelayanan BLUD				
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Brebes	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Ir. Soekarno	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Bumiayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	
PUSKESMAS							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Brebes	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Brebes
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tanjung	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Tanjung

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Banjarharjo	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Banjarharjo
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bumiayu	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Bumiayu
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Paguyangan	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Paguyangan
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bandungsari	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Bandungsari
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bantarkawung	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Bantarkawung

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bentar	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Bentar
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bojongsari	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Bojongsari
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Buaran	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Buaran
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Bulakamba	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Bulakamba
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikakak	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Cikakak

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Cikeusal Kidul	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Cikeusal Kidul
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jagalempeni	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Jagalempeni
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatibarang	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Jatibarang
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Jatirokeh	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Jatirokeh
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaligangsa	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kaligangsa

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kalimati	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kalimati
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kaliwadas	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kaliwadas
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kecipir	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kecipir
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kemurang Wetan	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kemurang Wetan
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kersana	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kersana

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Ketanggungan	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Ketanggungan
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Klikiran	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Klikiran
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kluwut	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kluwut
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Kutamendala	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Kutamendala
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Larangan	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Larangan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Losari	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Losari
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Luwunggede	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Luwunggede
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Pemaron	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Pemaron
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Salem	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Salem
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sidamulya	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Sidamulya

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sirampog	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Sirampog
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sitanggal	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Sitanggal
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Siwuluh	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Siwuluh
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tonjong	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Tonjong
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Wanasari	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Wanasari

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
					Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas Winduaji	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat yg diperoleh dari survey yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penguna layanan kesehatan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas Winduaji